

# **PROSIDING SEMINAR NASIONAL**

**Kerjasama  
Ikatan Sarjana Katolik Indonesia – DIY, dan  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

*Tema :*

**“Pengembangan Kebijakan Ekonomi yang Berkeadilan  
bagi semua : Cita-cita dan Realita”**

1. **Perihal Ekonomi yang Tercerabut / B. Herry Priyono, Ph.D. – Staf Pengajar Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara, Jakarta.**
2. **Ekonomi Pancasila : Dari Wacana ke Realita / Prof. Gunawan Sumodiningrat, M.Ec., Ph.D. – Dirjen Pemberdayaan Sosial RI**
3. **Orientasi Kebijakan Ekonomi Indonesia / Dr. R. Maryatmo, MA. – Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta**
4. **Gerakan Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan / Bambang Ismawan – Ketua Yayasan Bina Swadaya**



**Kamis, 8 Nopember 2007  
Ruang Auditorium Gedung Bonaventura  
Kampus III Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Jln. Babarsari 43 Yogyakarta**

# Perihal Ekonomi yang Tercerabut\*

B. Herry-Priyono\*\*

Dalam seminar ini, kepada saya ditugaskan pokok yang menyangkut tema seminar agar dilihat dari perspektif 'filsafat ekonomi-politik'. Tentu, itu perspektif mahabesar yang mengatakan begitu banyak, dan karena itu juga tidak mengatakan apa-apa. Itulah mengapa dengan terbata-bata saya coba mereka-reka apa yang dimaksud dengan 'filsafat ekonomi-politik', dan apa yang tertulis di bawah ini tidak lebih dari hasil kegagalan itu.

Berbeda dengan disiplin ilmu-ilmu yang spesifik, filsafat (setidaknya yang dipelajari di berbagai tempat studi filsafat) tidak bermaksud memperluas horizon pengetahuan kita dengan menemukan atau mengajukan data dan informasi baru mengenai kehidupan manusia, masyarakat, ataupun alam semesta. Filsafat "hanya" memperdalam pemahaman kita dengan merefleksikan apa yang kita telah merasa akrab – pengalaman, gagasan, konsep, ataupun aktivitas dan praktik-praktik yang membentuk keseharian hidup kita –, namun biasanya lolos dari radar refleksi kita persis karena kita sudah sedemikian akrab dengan semua itu. Sebagaimana perspektif filsafat hanya merefleksikan perkara-perkara yang kita merasa sudah akrab (seperti sakit, rasa senang, kelaparan, uang, kerja, belajar, dst), begitu juga sketsa kecil refleksi filosofis ini tidak akan mengajukan data-data baru yang menyangkut tema seminar kita hari ini.

Dalam rangka tema besar seminar hari ini,<sup>1</sup> saya hanya ingin mengiris bagian sangat kecil untuk saya haturkan sebagai titik-berangkat refleksi. Pengirisan pokok tematik itu ingin saya mulai dengan mengajukan pertanyaan berikut ini: "apa artinya ekonomi yang berkeadilan?" Terhadap pertanyaan itu, tulisan kecil ini hendak mengajukan argumen sederhana: adil-tidaknya kebijakan ekonomi tidak terkait dengan debat populer "pro-pasar *versus* anti-pasar", melainkan terkait dengan sejauh mana ekonomi-pasar punya ciri "tertanam" atau "tercerabut" dari kebutuhan, kapasitas, potensi, serta relasi sosial orang-orang biasa dalam masyarakat. Tata-ekonomi lebih mungkin mendekati ciri berkeadilan apabila kinerja ekonomi-pasar "tertanam" dalam kebutuhan, kapasitas, potensi, dan relasi orang-orang biasa. Dan ia lebih mungkin mendekati ciri tidak-adil apabila "tercerabut" dari kebutuhan, kapasitas, potensi, serta relasi sosial orang-orang biasa.

Ada dua catatan bagi kehati-hatian. Pertama, refleksi filosofis menuntut pemakaian prinsip ketat berikut: dari "apa yang ada" (*what is*), kita tidak dapat menyimpulkan "apa yang seharusnya ada" (*what should be*).<sup>2</sup> Misalnya, dari praktik ekonomi yang sekarang dijalankan, kita tidak dapat menyimpulkan bahwa praktik ekonomi itulah yang memang seharusnya dijalankan. Atau, dari tata-ekonomi yang kini dianggap adil, kita tidak dapat menarik kesimpulan bahwa tata-ekonomi itulah yang seharusnya adil. Dengan kata lain, tidak ada gunanya kita melakukan refleksi filosofis atas persoalan ekonomi, apabila kita menganggap praktik ekonomi yang faktual ada sekarang (*what is*) merupakan praktik ekonomi yang seharusnya (*what should be*).

Kedua, refleksi filosofis tidak berambisi menjadi aplikatif, dalam arti langsung dapat diterapkan. Seperti telah disebut, refleksi filosofis tidak mengajukan informasi dan data baru, melainkan hanya merefleksikan informasi dan data yang sudah kita akrabi. Dengan refleksi atas informasi atau data yang sudah kita kenali secara akrab itu, filsafat hanya coba mengajukan *insights* yang mungkin berguna bagi re-

\* Disampaikan dalam Seminar Nasional "Pengembangan Kebijakan Ekonomi yang Berkeadilan bagi Semua: Cita-Cita dan Realita", Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA), Yogyakarta, 8 November 2007.

\*\* Staff Pengajar Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara, Jakarta; PhD London School of Economics (LSE), Inggris.

<sup>1</sup> Tema Seminar: "Pengembangan Kebijakan Ekonomi yang Berkeadilan bagi Semua: Cita-cita dan Realita" (TOR dari Panitia 18 Agustus 2007).

<sup>2</sup> Dalam refleksi filsafat, prinsip ini merupakan prinsip mashyur yang diajukan filsuf Skotlandia, David Hume (1711-1776) Lihat David Hume, *A Treatise of Human Nature* (ed. L. A. Selby-Bigge), Oxford: Clarendon Press, [1739] 1978, hlm. 469-470. Untuk penerapannya dalam ilmu ekonomi, lihat, misalnya, Subroto Roy, *Philosophy of Economics: On the Scope and Reason in Economic Inquiry*, London: Routledge, 1991, terutama Bab 2.

orientasi cara kita berpikir dan cara kita melakukan. Dalam hal ini, gagasan, tindakan, atau kebijakan ekonomi kita.

Maka, selamat datang ke dunia *insights*, yang sering hanya bisa kita peroleh dengan mempertanyakan apa yang sudah kita anggap sebagai alamiah dan diterima begitu saja.

### Bukan Pro-Pasar vs Anti-Pasar

Dari sekian banyak perkara dalam wacana ekonomi-politik, salah satu perdebatan populer berisi oposisi “pro-pasar *versus* anti-pasar”. Posisi pro-pasar melihat diri sebagai pembawa gagasan ekonomi yang adil dengan melihat posisi anti-pasar sebagai pembawa ketidakadilan ekonomi. Dan sebaliknya, posisi anti-pasar melihat diri sebagai pembawa gagasan ekonomi yang adil dengan menganggap posisi pro-pasar sebagai pembawa ketidakadilan ekonomi. Misalnya, mereka yang mendukung “privatisasi” perguruan tinggi digambarkan sebagai kaum “pro-pasar”, sedangkan mereka yang menentang dilihat sebagai kaum “anti-pasar”.

Istilah oposisional “pro-pasar vs anti-pasar” seperti itu lebih mungkin merupakan hasil kerja jurnalistik yang, karena kemalasan atau karena penghematan baris, memakai dua istilah itu untuk melukiskan posisi dua kubu yang sedang berdebat. Dari simplifikasi jurnalistik itu, istilah oposisional tersebut kemudian masuk ke dalam idiom wacana populer lalu membentuk kerancuan kita dalam memandang perdebatan ekonomi-politik. Yang rupanya menjadi pokok perdebatan sangat jauh dari oposisi pro-pasar vs anti-pasar. Selain itu, pokok soalnya juga tidak terkait langsung dengan posisi setuju atau menolak pemakaian mekanisme pasar dalam tata ekonomi.

Mulailah dari contoh kecil. Saya tidak bisa membayangkan kita memakai baju atau sepatu yang kita kenakan hari ini melalui proses produksi-alokasi atas komando seorang Presiden atau Menteri Sandang, dan tidak melalui proses produksi-alokasi berdasarkan insentif dan signal harga (*price*). Mekanisme pasar (*market mechanism*) adalah genius yang mengubah proses produksi-alokasi yang sangat rumit secara administratif menjadi sederhana dan spontan. Seperti dapat diduga, kesederhanaan dan spontanitas produksi-alokasi komoditas berdasarkan mekanisme pasar ini melibatkan daya pengerahan energi, kreativitas, kewirausahaan, inovasi, daya juang, dan watak aktif manusia yang pada gilirannya memicu perkembangan peradaban kita.<sup>3</sup>

Karena itu, cukup pasti hanya pengindap patologi otoritarianisme yang akan bersikap “anti-pasar”, seperti istilah yang sering dipakai oleh para jurnalis untuk menyebut para pengkritik World Trade Organisation (WTO) atau para peserta World Social Forum (WSF). Mereka yang disebut kaum “anti-pasar” biasanya juga bukan orang-orang yang menolak mekanisme-pasar, seperti yang digambarkan dalam tulisan-tulisan jurnalistik. Lalu apa yang sesungguhnya menjadi titik perdebatan?

Pada hemat saya, pokok perdebatan tidak terletak dalam penerimaan (*pro*) atau penolakan (*contra*) ‘mekanisme pasar’ bagi proses kehidupan ekonomi, melainkan sejauh mana kinerja mekanisme pasar “tertanam” (*embedded*) atau “tercerabut” (*dis-embedded*) dari kebutuhan, kapasitas, potensi produktif, serta relasi sosial orang-orang biasa.<sup>4</sup>

Istilah “orang-orang biasa” tidak perlu disengketakan sampai menumpahkan darah dan menghamburkan waktu. Di Indonesia, “orang-orang biasa” itu adalah sosok-sosok yang setiap hari ada di sekitar kita: para petani, buruh, nelayan, pedagang sayur, pegawai rendahan, penganggur, dan

<sup>3</sup> Dalam rumusan Adam Smith: “...the desire of bettering our condition, a desire which, though generally calm and dispassionate, comes with us from the womb, and never leaves us till we go into the grave” (Adam Smith, *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* (ed. E. Cannan), New York: Modern Library, [1776] 2000, hlm. 372).

<sup>4</sup> Istilah *embedded* dan *dis-embedded* saya pinjam dari Karl Polanyi, pemikir ekonomi Hungaria. Selain itu, arah argumen ini diilhami oleh (a) gagasan Polanyi dalam karya besarnya, *The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time* (Boston: Beacon Press, [1944] 2001); (b) gagasan para pemikir Mazhab ‘Ekonomi Pasar Sosial’ (*soziale Marktwirtschaft*) (Lihat, misalnya, Peter Koslowski (ed), *The Social Market Economy: Theory and Ethics of the Economic Order*, Berlin: Springer, 1998); (c) beberapa refleksi dari perspektif ‘ekonomi sosial’ (lihat, misalnya, Mark A. Lutz, *Economics for the Common Good*, London: Routledge, 1999); (d) pemikiran para ilmuwan sosial Perancis yang tergabung dalam Mazhab *Régulation* (lihat, misalnya, Robert Boyer & Yves Saillard (eds), *Régulation Theory: The State of the Art*, London: Routledge, 1995).

semacamnya. Atau, meminjam kategori yang sering dipakai Bank Dunia (World Bank), mereka adalah 108,78 juta penduduk Indonesia (49%) yang hidup dengan biaya kurang dari 2 dollar AS per hari/per orang.<sup>5</sup> Jika saya boleh memakai istilah lain, “orang-orang biasa” itu adalah 108,78 juta penduduk Indonesia yang hidup dengan ‘ekonomi sekedar bertahan hidup’ (*survival economy*), yang tentu berbeda dengan para penghuni kantung-kantung ekonomi *haut monde* (seperti CEOs atau manajer korporat) yang aktivitasnya bukan lagi untuk sekedar bertahan hidup, tetapi untuk ‘ekonomi akumulasi’ (*accumulation economy*).<sup>6</sup>

Dalam kaitannya dengan pokok bahasan kita, mungkin tidak terlalu keliru untuk mengatakan bahwa soal “ketertanaman” (*embeddedness*) dan “ketercerabutan” (*dis-embeddedness*) kinerja ekonomi-pasar terutama terkait dengan kondisi hidup 108,78 juta penduduk Indonesia ini. Maka, titik bidik dapat dipersempit: soal ekonomi Indonesia bukan masalah menerima atau menolak pemakaian mekanisme pasar, tetapi sejauh mana kinerja ekonomi-pasar “tertanam” atau “tercerabut” dari kebutuhan, kapasitas, potensi produktif, serta relasi sosial dari sekurangnya 108,78 penduduk Indonesia.

### Korporatokrasi yang Tercerabut

Pada persoalan yang tersebut terakhir di atas itulah mungkin terletak kunci untuk menjawab sejauh mana kebijakan ekonomi di Indonesia adil atau tidak adil.

Pertama, dengan mengandaikan tidak keliru total, saya tidak melihat corak ekonomi-pasar di Indonesia cukup “tertanam” dalam kebutuhan, kapasitas, potensi produktif, serta relasi sosial orang-orang biasa. Rataan kita atas tidak-bergeraknya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah istilah lain dari corak ekonomi-pasar di Indonesia yang tidak “tertanam” dalam kebutuhan, kapasitas, potensi produktif, serta relasi sosial orang-orang biasa. Apabila “tidak tertanam”, apakah itu berarti “tercerabut”? Dan seandainya “tercerabut”, apa tandanya? Tentu, tanda adalah nama lain bagi indikator, dan biasanya indikator hanya bisa dinyatakan lewat *proxy*. Tabel 1 berisi persentase kapitalisasi pasar perusahaan publik di Indonesia. Angkanya berasal dari 8 tahun lalu, namun bukannya tidak berguna untuk mengenali pola “ketercerabutan” ekonomi-pasar di Indonesia.

Tabel 1  
Kapitalisasi & Kontrol Pasar di Indonesia oleh Keluarga Bisnis (dalam Persen) – 1999

Kapitalisasi oleh berapa Keluarga Bisnis?	Persentase Kapitalisasi Pasar
- 1 keluarga bisnis	16,6 %
- 5 keluarga bisnis	40,7 %
- 10 keluarga bisnis	57,7 %
- 15 keluarga bisnis	61,7 %
Kontrol kepemilikan di tangan siapa?	Persentase Kontrol
- Keluarga bisnis	71,5 %
- Badan keuangan dan perusahaan	15,2 %
- Pemerintah	8,2 %
- Warga biasa	5,1 %

Sumber: Stijn Claessens *et al.*, *Who Controls East Asian Corporations?*, World Bank Research Paper, 1999, hlm. 6.

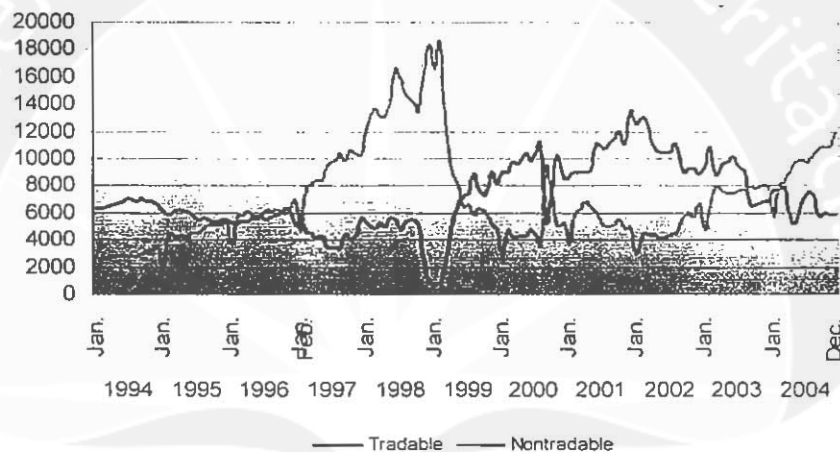
Kedua, “ketercerabutan” tersebut bukan hanya menyangkut tidak-terkaitnya corak ekonomi-pasar dengan kebutuhan, kapasitas, potensi produktif, serta relasi sosial orang-orang biasa, tetapi lebih jauh lagi

<sup>5</sup> The World Bank & The World Bank Office in Jakarta, *Making the New Indonesia Work for the Poor*, November 2006.

<sup>6</sup> Tentu, kategori biaya hidup 2 dollar AS per hari/per orang itu bisa disangsikan relevansinya. Bukankah kategori biaya hidup 2 dollar itu tidak cukup mempertimbangkan perbedaan biaya hidup antara “negara kaya” dan “negara miskin”? Misalnya, bukankah penduduk Jakarta membayar air *ledeng* jauh lebih murah daripada penduduk New York? Apa yang mengejutkan adalah bahwa pada indeks harga yang setara, orang yang hidup di pemukiman kumuh di Jakarta membayar air *ledeng* 5-10 kali lebih mahal daripada orang yang hidup di “kota kaya” seperti London dan New York (UNDP, *Human Development Report 2006*).

menyangkut “ketercerabutan” aspek-finansial ekonomi dari aspek-riil ekonomi. Gejalanya, transaksi produk-produk finansial seperti sekuritas, *hedge funds*, *derivatives*, *futures*, *forwards*, serta berbagai transaksi spekulatif lain jauh lebih berkembang daripada proses ekonomi untuk memproduksi mesin, sepatu, pakaian, meubel, beras, produk pertanian, minyak goreng, jalan, dan sebagainya. Ringkasnya, “ketercerabutan” sektor finansial (*financial sector*) dari sektor riil (*real sector*), dan “ketercerabutan” itu membentuk virtualisasi ekonomi.<sup>7</sup> Jadi, sangat mungkin sektor ekonomi finansial maju pesat tanpa kaitan apapun dengan sektor riil. Itulah yang ada di belakang ratapan atas kemacetan sektor riil di Indonesia. Jika *proxy* pertumbuhan sektor *tradable* (pertanian, pertambangan, dan manufaktur) dan *non-tradable* (keuangan, jasa, komunikasi) dapat dipinjam sebagai penunjuk perbedaan sektor-riil dan sektor-finansial, cukup jelas dalam tahun 2005 sektor-riil hanya tumbuh 3,5%, sedangkan sektor-finansial tumbuh 8%.<sup>8</sup> Atau, kalau memakai *proxy* kredit investasi antara sektor *tradable* dan *non-tradable*, Grafik di bawah ini mengisyaratkan bagaimana sektor finansial jauh lebih berkembang daripada sektor riil ekonomi.

Grafik  
Kredit Investasi Dua Sektor di Indonesia (dalam Milyar Rp)



Sumber: dihitung dari data Bank Indonesia (atas kebaikan A. Prasetyantoko, 2007)

Ketiga, mungkin tidak terlalu keliru untuk mengatakan bahwa pola “ketercerabutan” ekonomi-pasar di Indonesia terjadi bahu-membahu dengan gejala yang seringkali disebut *corporatocracy*. ‘Korporatokrasi’ adalah kondisi tata ekonomi-politik suatu bangsa yang secara mendalam ditentukan oleh kinerja perusahaan-perusahaan besar – maksud harafiah istilah ‘korporatokrasi’: pemerintahan oleh korporasi, sebagaimana ‘demokrasi’ berarti pemerintahan oleh *demos* (rakyat).<sup>9</sup> Tidak ada yang secara intrinsik “baik” atau “buruk” dalam gejala ‘korporatokrasi’. Ia sekedar istilah untuk menyebut corak rezim ekonomi suatu bangsa. ‘Korporatokrasi’ selalu memberi kesan bahwa suatu bangsa telah mencapai atau berada pada tahap ekonomi modern, dengan, misalnya, kelas manajerial tertentu dan kapitalisasi melalui pasar bursa. Itu berita baiknya. Namun sesungguhnya kita tidak tahu persis apa kaitan antara ‘korporatokrasi’ dan *survival economy* sekitar 108,78 juta orang, kecuali bahwa orang sebanyak itu adalah (potensi) konsumen yang sangat besar.

Keempat, soal yang lebih tidak jelas lagi adalah kaitan antara ‘korporatokrasi’ dan “ketertanaman” ekonomi-pasar dalam kebutuhan, kapasitas, potensi produktif, serta relasi sosial orang-orang biasa. Apa

<sup>7</sup> Untuk kajian teoretik atas virtualisasi ekonomi yang membuat ekonomi-pasar “tercerabut” dari kebutuhan, kapasitas, potensi produktif, serta relasi sosial orang-orang biasa, lihat, misalnya, Gérard Duménil & Dominique Lévy, *Capital Resurgent: Roots of the Neoliberal Revolution*, Cambridge, MA: Harvard University Press, 2004.

<sup>8</sup> Badan Pusat Statistik (BPS) 2006; World Bank 2006.

<sup>9</sup> Istilah *corporatocracy* (korporatokrasi) saya pinjam dari Alvaro J. de Regil, *The Neo-Capitalist Assault, The Jus Semper Global Alliance*, August 2003, hlm. 2. Istilah itu merupakan bentukan dari kata Latin (*corporatio*; Inggris-AS: *corporation*; Inggris-British: *company*) dan Yunani (*kratein*: memerintah).

yang setiap hari kita dengar hanyalah arah kebijakan yang kira-kira berbunyi sebagai berikut: andai saja 'korporatokrasi' diberi iklim investasi yang kondusif sehingga para korporatokrat bisa beroperasi sebebaskan-bebasnya, niscaya "orang-orang biasa" akan terangkat dan para penganggur akan dipekerjakan. Dengan kata lain, 'korporatokrasi' adalah motor ekonomi yang akan menciptakan *nirvana*. Hampir setiap hari kita membaca hal itu di koran-koran, sampai akhirnya kita sendiri percaya bahwa 'korporatokrasi' Indonesia adalah kebijakan ekonomi yang seharusnya memang terjadi (*what should be*). Kita memang belajar itu di *textbooks* ekonomi, tetapi sesungguhnya kebijakan itu lebih tepat disebut 'siasat korporatokrasi', bukan 'kebijakan ekonomi'.

Kelima, seperti telah disebut, kebijakan ekonomi yang berupa 'korporatokrasi' tidak dengan sendirinya "baik" atau "buruk". Namun, agar terkait dengan kondisi hidup 108.78 juta penduduk, kebijakan *textbook* yang kita pelajari di fakultas-fakultas ekonomi itu mengandaikan banyak hal: dari *skills* tinggi tenaga kerja sampai daya-serap tinggi atas tenaga kerja. Tanpa terpenuhinya syarat-syarat itu, kebijakan ekonomi 'korporatokrasi' dalam lautan kemiskinan di Indonesia menjadi resep tercepat untuk membuat kinerja ekonomi-pasar "tercerabut" dari kebutuhan, kapasitas, potensi produktif, dan relasi sosial orang-orang biasa. Tambahan lagi, salah satu unsur sentral 'korporatokrasi' adalah jalur padat-modal (baca: se-sedikit mungkin tenaga-kerja) dan padat teknologi tinggi (baca: tuntutan *skill* teknologis tinggi). Tabel 2 memang tidak secara langsung menunjukkan gejala 'korporatokrasi' di Indonesia. Namun, dalam banyak hal kecenderungan statistik dalam Tabel 2 dapat dipakai sebagai indikator tentang apa yang akan terjadi apabila kita bersikeras menempuh 'korporatokrasi' sebagai strategi utama kebijakan ekonomi. Jika data BAPPENAS bisa diandalkan, statistik dalam Tabel 2 menunjukkan bahwa syarat daya-serap tinggi samasekali tidak dapat dijadikan tumpuan harapan. Gejala itu tampak jelas dari penurunan yang konstan daya-serap tenaga kerja per 1 persen pertumbuhan ekonomi dalam satu dasawarsa terakhir.<sup>10</sup>

**Tabel 2**  
**Daya-Serap Tenaga Kerja per 1% Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia**

Tahun	1% pertumbuhan menyerap berapa pekerja?
Sebelum 1994	400.000 pekerja
1994	375.000 pekerja
2001	253.000 pekerja
2003	248.000 pekerja
2005	178.000 pekerja
2006	42.000 pekerja

Sumber: BAPPENAS (berbagai tahun).

Keenam, pokok di atas samasekali bukan untuk mengabaikan pentingnya sektor perusahaan-perusahaan besar ('korporatokrat') sebagai *pull factor* bagi transformasi ekonomi Indonesia menuju ekonomi modern. Namun, bila suatu 'kebijakan' utama (*policy*) ternyata tidak *nyambung* dengan 'kenyataan' (*reality*), tentu saja bukan realitas-nya yang mesti dipersalahkan, melainkan kebijakan-nya yang mesti dipertanyakan lantaran tidak *nyambung* dengan realitas.<sup>11</sup> Atau bila ekonomi korporatokrasi tidak juga mampu memecahkan kemiskinan dan pengangguran yang begitu luas, bukan realitas kemiskinan dan pengangguran-nya yang ganjil, tetapi korporatokrasi sebagai kebijakan pokok ekonomi yang mesti dipertanyakan. Dari pokok tajam ini segera kelihatan bahwa dengan atau tanpa restu pemerintah dan para korporatokrat, upaya "menanam kembali" (*to re-embed*) ekonomi-pasar dalam

<sup>10</sup> Statistik agregat seperti dalam Tabel 2 selalu miskin dalam spesifikasi tentang tingkat daya-serap tenaga kerja oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Apa yang dimaksud mungkin dapat dikenali dari contoh berikut. Dari wilayah Papua Barat di tahun 2005, misalnya, Perusahaan PIR Arso merencanakan untuk menyerap 20.160 tenaga kerja, tetapi secara faktual (realisasi) hanya mempekerjakan 1.135 orang. Juga dari kawasan yang samia, PT Varita Majutama berencana menyerap 21.600, namun realisasi hanya 906 orang dipekerjakan (Sumber: <http://www.papua.go.id/ddpperkebunan/Invesdantenagakerja.htm>). Pola itu luas terjadi di berbagai perusahaan.

<sup>11</sup> Bandingkan, misalnya, dengan Helmut Arndt, *Economic Theory vs Economic Reality*, Michigan: Michigan State University Press, 1984, hlm. 93.

kapasitas, kebutuhan, potensi produktif, dan relasi sosial orang-orang biasa menjadi imperatif yang mendesak.

Ringkasnya, tidak-relevannya perdebatan “pro-pasar vs anti-pasar” mengisyaratkan bahwa pokok masalahnya bukan ‘ekonomi-pasar’ (seperti yang sering kita dengar dalam perdebatan populer), melainkan sejauh mana ekonomi-pasar “tertanam” atau “tercerabut” dari kebutuhan, kapasitas, potensi produktif, dan relasi orang-orang biasa. Itulah *insight* pertama yang mungkin dapat kita tarik dari pokok-pokok di atas. Apakah imperatif untuk “menanam-kembali” ekonomi pasar itu ditempuh melalui keseriusan mengejar agenda UMKM, atautah dengan mengawinkan ‘korporatokrasi’ dan ‘UMKM’, ataupun dengan mengawinkan ‘koperasi kredit’ dan ‘kewirausahaan mikro/kecil’ ala Bank Grameen (cf. Muhammad Yunus, Bangladesh), semua itu bergantung pada opsi kita.

Namun penentuan opsi gerakan/kebijakan ekonomi mana yang hendak ditempuh bukan didasarkan terutama pada *convenience* (kepraktisan yang paling menyenangkan), melainkan pada pertimbangan ‘keadilan’ dan ‘ketidakadilan’, yang persis merupakan pokok masalah yang diajukan dalam seminar hari ini. Dan terhadap pokok itu, sketsa kecil ini mengajukan posisi sebagai berikut: ekonomi-pasar yang lebih mendekati ciri ‘adil’ adalah ekonomi-pasar yang “tertanam”, sedangkan ekonomi yang lebih mendekati ciri ‘tidak-adil’ adalah ekonomi-pasar yang “tercerabut” dari kebutuhan, kapasitas, potensi produktif, dan relasi orang-orang biasa.

Mungkin itulah implikasi paling elementer dari refleksi filosofis kecil ini atas corak tata-ekonomi: dari praktik kebijakan yang kini faktual dijalankan (*what is*), kita tidak dapat menyimpulkan bahwa praktik kebijakan itulah yang memang seharusnya dilakukan (*what should be*).

Pada titik ini, ada satu pertanyaan agak tersembunyi yang mungkin baik diajukan: bila soalnya bukan ‘ekonomi-pasar’, dan bila ekonomi-pasar yang lebih mendekati ciri adil berupa ekonomi-pasar yang “tertanam”, apakah “ketertanaman” ekonomi-pasar dapat menjamin cita-cita ‘keadilan’ (*justice*) yang tentu lebih luas daripada sekedar ‘keadilan ekonomi’ (*economic justice*)? Meski tersembunyi, pertanyaan itu sentral karena, dengan menyitir bahasa Kitab Suci Kristiani, “inania tidak hanya hidup dari roti, tetapi juga dari...”<sup>12</sup> Baris kosong itu dapat diisi dengan hal-hal penting lain untuk hidup selain roti. Dalam konteks tema seminar kita, ‘keadilan’ bukan hanya menyangkut urusan ekonomi, tetapi juga hukum, politik, budaya, pendidikan, kesehatan, gizi makanan, dsb.

### **Kolonisasi oleh Pasar sebagai Ideologi**

Pertanyaan di atas membawa kita ke pokok kontroversi lebih dalam, yaitu kaitan antara ekonomi-pasar (*market economy*) dan ranah-ranah lain dalam kehidupan bersama, seperti hukum (*law*), politik (*politics*), pendidikan (*education*), kesehatan (*health*), budaya (*culture*), dsb.

Terhadap persoalan itu, sketsa kecil ini mau mengajukan argumen sebagai berikut: kritik terhadap ‘ekonomi-pasar’ dilancarkan bukan hanya karena kinerja ekonomi-pasar “tercerabut” (*dis-embedded*), tetapi juga karena “ketercerabutan” (*dis-embeddedness*) itu muncul dari proyek mengubah bidang-bidang seperti hukum, pendidikan, kesehatan, politik, budaya, dsb agar dijalankan menurut prinsip ekonomi-pasar.<sup>13</sup> Jika disimak lebih teliti, posisi dari kaum yang oleh para jurnalis malas disebut “anti-pasar” sesungguhnya tidak berisi penolakan terhadap ekonomi-pasar, tetapi berisi kritik terhadap proyek untuk menerapkan prinsip dan logika ekonomi-pasar ke seluruh bidang kehidupan, dari hukum sampai politik, dari pendidikan sampai kesehatan. Ringkasnya, apa yang ditentang bukan ‘ekonomi-pasar’, tetapi ‘fundamentalisme pasar’ (*market fundamentalism*).<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Injil Mateus 4: 4; Lukas 4: 4.

<sup>13</sup> Bandingkan, misalnya, dengan Pierre Bourdieu, *Acts of Resistance: Against the Tyranny of the Market 1*, New York: The New Press, 1998; Pierre Bourdieu, *Firing Back: Against the Tyranny of the Market 2*, New York: The New Press, 2003.

<sup>14</sup> ‘Fundamentalisme pasar’ (sering juga disebut ‘neo-liberalisme’) adalah istilah yang sudah luas dipakai dalam literatur populer maupun akademik. Keduanya menunjuk pada paham dan agenda menerapkan prinsip pasar-bebas bukan hanya sebagai prinsip koordinasi produksi-alokasi komoditas ekonomi, tetapi sebagai prinsip koordinasi produksi-alokasi semua bidang lain dalam tatanan masyarakat, bahkan sebagai prinsip koordinasi penataan seluruh masyarakat (lihat, misalnya, George Soros, *On Globalization*, New York: Public Affairs, 2002, hlm. 4-10; Joseph Stiglitz, *Making Globalization Work*, London: Penguin, 2006; Susan George, *The Lugano Report: On Preserving Capitalism in the Twenty-First Century*, London:

Pokok ini mungkin bertentangan dengan apa yang telah kita yakini dalam arus hidup sehari-hari (*what is*). Namun tugas refleksi filosofis adalah persis untuk mempertanyakan sejauh mana kolonisasi pasar atas bidang-bidang lain dalam hidup-bersama itu memang merupakan arah yang seharusnya terjadi (*what should be*). Beberapa pokok di bawah ini mungkin berguna.

Pertama, manusia adalah “taman keragaman”: ia sekaligus makhluk politik, makhluk ekonomi, makhluk sosial, makhluk hukum, makhluk kultural, makhluk spiritual, makhluk biologis, dan seterusnya. Itu berarti, manusia pasti seorang *homo oeconomicus*, tetapi *homo oeconomicus* pasti bukan keseluruhan manusia; sebagaimana manusia pasti seorang *homo politicus*, tetapi *homo politicus* cukup pasti bukan keseluruhan diri manusia. Karena itu, menciutkan (me-reduksi) manusia hanya sebagai ‘makhluk ekonomi’ cukup pasti merupakan kesesatan cara-berpikir dan kesesatan empirik, sebagaimana mereduksi manusia hanya sebagai ‘makhluk spiritual’ saja pasti merupakan kesesatan cara-berpikir dan kesalahan empirik.<sup>15</sup> Pokok ini mungkin kedengaran sebagai *commonsense*, namun punya implikasi luar biasa besar.

Kedua, mulailah dari sebuah pertanyaan. Apa artinya ketika ilmu ekonomi bilang bahwa manusia adalah *homo oeconomicus*, sebagaimana ilmu hukum yang bilang bahwa manusia adalah ‘makhluk aturan’? Jawabannya: klaim bidang ilmu tertentu seperti itu adalah klaim *ceteris paribus*. *Ceteris paribus* adalah istilah bahasa Latin untuk “dengan mengandaikan hal-hal lain sama/konstan”. Contohnya, agar analisis ilmu ekonomi dapat dilakukan secara spesifik, proses analisis mengandaikan bahwa manusia adalah “makhluk *cost-benefit*”, dengan menanggihkan (*suspending*) fakta bahwa manusia juga makhluk kultural, makhluk spiritual, makhluk politik, makhluk hukum, dst. Dengan kata lain, klaim bahwa manusia adalah makhluk ekonomi, atau makhluk hukum, atau makhluk politik, dst yang dilakukan oleh bidang-bidang ilmu tertentu adalah ‘syarat metodologis’ (*methodological postulate*) dalam kerja ilmiah bidang-bidang ilmu tertentu tersebut.<sup>16</sup> Atau, ia hanya bentuk *ceteris paribus*, dan bukan deskripsi siapa sebenarnya keseluruhan diri manusia. Tentu, manusia yang riil bukan hanya makhluk ekonomi, sebagaimana manusia yang riil juga bukan hanya makhluk spiritual ataupun makhluk politik.

Reduksi seperti itulah yang luas terjadi dalam cara kita melakukan analisis.<sup>17</sup>

## Kolonisasi oleh Pasar sebagai Kebijakan

Bahkan reduksi itu tidak hanya terjadi sebatas kerja analisis, tetapi menerobos masuk dan kuat membentuk arah berbagai kebijakan publik.

Pertama, analog dengan keragaman dimensi ‘manusia’ sebagai sekaligus makhluk sosial, makhluk politik, makhluk ekonomi, makhluk spiritual, makhluk hukum, dst, begitu pula ‘masyarakat’ (tata hidup bersama) merupakan taman-keragaman dengan keanekaan bidang yang terlembagakan dalam, misalnya, bidang hukum, budaya, politik, pendidikan, kesehatan, dsb. Dan analog dengan keragaman-dimensional hidup seorang ‘manusia’, tiap bidang dalam keragaman dimensional tata ‘hidup bersama’ punya prinsip serta *raison d’être*-nya (alasan adanya) sendiri. Alasan adanya sekolah, misalnya, adalah pertama-tama untuk mendidik (*to educate*), dan bukan untuk berebut kekuasaan atau mengeruk laba finansial. Tentu saja, perhitungan *cost-benefit* (aspek ekonomis) mesti terlibat dalam pengelolaan sekolah yang baik, tapi kalkulasi *cost-benefit* itu adalah bagian manajemen untuk mengabdikan tujuan utama (*raison d’être*) sekolah, yaitu mendidik. Pokok itu juga berlaku bagi bidang-bidang yang lain, seperti hukum, politik, budaya, kesehatan, dst. Ringkasnya, semua bidang dalam tata hidup-bersama punya dimensi *cost-benefit* (sebagaimana semua bidang dalam tata hidup-bersama juga punya dimensi kultural, legal, politis, dsb), tetapi tidak semua bidang itu ada untuk *cost-benefit*. Logika bisnis penting untuk mengelola berbagai

---

Pluto Press, [1999] 2003; David Harvey, *A Brief History of Neoliberalism*, Oxford: Oxford University Press, 2005; A. Saad-Filho & D. Johnston (eds), *Neoliberalism: A Critical Reader*, London: Pluto Press, 2005).

<sup>15</sup> Lihat Karel Kosik, *Dialectics of the Concrete: A Study on Problems of Man and World*, Boston: D. Reidel, 1976, terutama Bab II.

<sup>16</sup> B. Herry-Priyono, ‘*Homo Oeconomicus*: Dari Pengandaian ke Kenyataan’, dalam I. Wibowo & B. Herry-Priyono (eds), *Sesudah Filsafat: Esai-Esai untuk Franz Magnis-Suseno*, Yogyakarta: Kanisius, 2006, terutama hlm. 117-132.

<sup>17</sup> Untuk pembongkaran kritis atas gejala ini dalam Mazhab Ekonomi Neo-Klasik, lihat Martin Hollis & Edward J. Nell, *Rational Economic Man: A Philosophical Critique of Neo-Classical Economics*, Cambridge: Cambridge University Press, 1975; juga Joan Robinson, *Economic Philosophy*, London: Penguin, 1962, terutama Bab 3 dan 6.

bidang kehidupan, tetapi tidak semua bidang kehidupan adalah bisnis; ekonomi-pasar begitu penting bagi tata hidup bersama, tetapi tidak semua bidang dalam hidup bersama adalah ekonomi-pasar. Bila pembedaan ini tidak dilakukan, lalu tak ada bedanya antara 'ekonomi pasar' (*market economy*) dan 'masyarakat pasar' (*market society*), sebab 'masyarakat' dilihat identik dengan 'ekonomi pasar'.<sup>18</sup>

Kedua, kecenderungan totalisasi prinsip/logika ekonomi-pasar ke bidang-bidang lain dalam tata hidup-bersama itulah yang rupanya sedang menyerbu kita bagai gelombang sangat kencang.<sup>19</sup> Alasan adanya tata pengadilan (*court*), misalnya, adalah "manajemen kesamaan hukum untuk mencapai keadilan". Penerapan prinsip ekonomi-pasar dalam kinerja pengadilan akan berarti "keadilan" selalu hanya dimenangkan oleh mereka yang mampu membayar paling tinggi, sebab ekonomi-pasar beroperasi dengan prinsip keramat "pembayar tertinggi adalah pemenang" (*the highest bidder, the winner*). Implikasi yang sama juga bisa diterapkan pada bidang-bidang lain, seperti pendidikan-sekolah, pilkada, kesehatan, akses ke air bersih, informasi, dst. Itu akan berarti, pendidikan dan kesehatan yang paling minimal pun bukan lagi merupakan 'hak asasi' (*human right*), tetapi soal 'daya-beli' (*purchasing power*). Sesungguhnya totalisasi ekonomi-pasar ini tidak menjadi soal jika, dan hanya jika, semua orang punya daya-beli tinggi.<sup>20</sup> Namun argumen seperti ini segera menabrak syaratnya sendiri yang tidak terpenuhi, sebab sekurangnya 108,78 juta orang Indonesia punya daya-beli rendah. Dengan kata lain, proyek totalisasi 'prinsip pasar' ke berbagai bidang kehidupan lain mungkin tidak akan menjadi masalah bagi para konglomerat, namun cukup pasti akan "mengutuk" sekurangnya 108,78 juta penduduk Indonesia ke dalam ketidakadilan abadi.

Ketiga, pokok di atas punya kaitan langsung dengan tema seminar kita hari ini, yaitu perihal 'Kebijakan Ekonomi yang Berkeadilan'. Kaitannya terletak dalam pokok berikut ini: Tidaklah cukup gerakan/kebijakan menuju ekonomi-yang-berkeadilan dilancarkan dengan "menanam kembali" (*to re-embed*) ekonomi-pasar dalam kebutuhan, kapasitas, potensi produktif, serta relasi sosial orang-orang biasa, tetapi juga dengan mengubah corak berbagai kebijakan publik yang selama ini menjadi alat penerapan prinsip pasar ke berbagai bidang kehidupan bersama yang *raison d'être*-nya (alasan adanya) jelas-jelas bukan untuk tujuan ekonomi-pasar. Seperti ditunjuk Susan George, "bisnis dan ekonomi-pasar punya wilayah kinerjanya sendiri, tetapi wilayah itu tidak dapat memangsa seluruh ranah eksistensi manusia".<sup>21</sup> Komoditas (*commodity*) adalah motor transaksi ekonomi, tetapi tidak semua aspek hidup manusia dan tata masyarakat adalah komoditas.<sup>22</sup>

Totalisasi prinsip pasar-bebas ke semua bidang tata hidup-bersama itu sering disebut 'fundamentalisme pasar', atau sering pula disebut 'neo-liberalisme'. Mirip seperti 'fundamentalisme agama' yang berambisi menjadikan agama (*religion*) tertentu sebagai satu-satunya prinsip untuk mengorganisir seluruh tatanan masyarakat, demikian pula 'fundamentalisme pasar' berambisi menjadikan

<sup>18</sup> Bandingkan, misalnya, dengan Don Slater & Fran Tonkiss, *Market Society*, Cambridge: Polity, 2001. hlm. 197-203.

<sup>19</sup> Kecenderungan ini bukan cerita rekaan, tetapi bahkan dalam literatur akademik merupakan tendensi yang kuat. Lihat, misalnya, Gary S. Becker, *The Economic Approach to Human Behavior*, Chicago: The University of Chicago Press, 1976 (lihat terutama hlm. 14); George Stigler, 'Economics – The Imperial Science', *Scandinavian Journal of Economics*, 86/3, 1984, hlm. 301-313; Jack Hirshleifer, 'The Expanding Domain of Economics', *American Economic Review*, 75/6, December 1985. Dalam ilmu politik, lihat, misalnya, Anthony Downs, *An Economic Theory of Democracy*, New York: Harper & Row, 1957.

<sup>20</sup> Bandingkan, misalnya, dengan Philippe van Parijs, *Real Freedom for All: What (If Anything) Can Justify Capitalism?*, Oxford: Clarendon Press, 2003, terutama Bab 2.

<sup>21</sup> Susan George, *A Short History of Neoliberalism: Twenty Years of Elite Economics and Emerging Opportunities for Structural Change*, Paper presented to the Conference on Economic Sovereignty in a Globalising World, Bangkok, 24-26 March, 1999, hlm 6.

<sup>22</sup> Pokok ini berlaku bahkan dari perspektif ekonomi yang paling ketat. Misalnya: "Once love and public spirit are equated with a scarce resource, the need to economize it seems self-evident. Yet a moment's reflection is enough to realize that the analogy is not only questionable but a bit absurd – and therefore funny.... We know that the supply of such resources as love and public spirit is not fixed or limited as may be the case for other factors of production. The analogy is faulty for two reasons: first of all, these are resources whose supply may well increase rather than decrease through use; second, these resources do not remain intact if they stay unused – like the ability to speak a foreign language or to play the piano, these moral resources are likely to become depleted and to atrophy if not used" (Albert O. Hirschman, *Rival Views of Market Society and Other Essays*, London: Penguin, 1986. hlm. 142-160).

pasar (*market*) sebagai satu-satunya prinsip pengatur seluruh tata hidup bersama. Meskipun mulai dari ranah yang berbeda, pada akhirnya kedua fundamentalisme itu merupakan bentuk totalitarianisme. Yang satu memakai 'doktrin agama' sebagai satu-satunya prinsip pengatur, sedangkan yang lain menggunakan 'daya-beli' sebagai satu-satunya prinsip pengatur tata hidup bersama.

Dari pokok-pokok di atas segera jelas bahwa, selain menyangkut soal-soal praktis seperti realisasi investasi, fungsi intermediasi bank, ataupun harga minyak, tema seminar kita hari ini juga menuntut pembongkaran cara kita memandang, cara kita memikirkan, serta cara kita merancang gerakan/kebijakan ekonomi. Meskipun saya tidak terlalu yakin refleksi seperti ini menarik bagi para peserta seminar, setidaknya saya sudah coba mengajukan kemungkinan yang boleh dilakukan oleh sebuah refleksi filosofis atas topik seminar kita hari ini.

### Epilog: Tiga Simpul

Seperti sudah disebut di awal, sketsa kecil ini hanya bertugas menyajikan semacam refleksi filosofis atas salah satu aspek dari tema seminar hari ini. Dan seperti juga telah disebut, refleksi filosofis ini tidak berambisi menjadi aplikatif, dalam arti langsung dapat diterapkan. Catatan kehati-hatian ini dimaksudkan untuk mencegah inflasi harapan.

Akan tetapi, semoga kehati-hatian itu tidak berarti bahwa refleksi filosofis kecil ini tidak punya manfaat. Toh andaipun ada, manfaatnya terbatas dalam hal *insights*. Maka untuk membuat eksplisit *insights* apa yang mungkin bisa ditarik dari refleksi kecil ini, perkenankan saya mengulangi pertanyaan awal yang menjadi titik-berangkat kita: "apa artinya kebijakan ekonomi yang berkeadilan?"

Pertama, dalam konteks perdebatan populer "pro-pasar vs anti-pasar", kebijakan ekonomi yang berkeadilan tidak punya kaitan dengan posisi keduanya. Ciri berkeadilan dari kebijakan ekonomi tidak terletak pada dipakai-tidaknya 'ekonomi-pasar', tetapi pada ciri "tertanam" atau "tercerabutnya" kinerja ekonomi-pasar dalam kaitannya dengan kebutuhan, kapasitas, potensi produktif, serta relasi sosial orang-orang biasa. Meskipun 'adil' adalah istilah yang terlalu agung, ekonomi-pasar yang "tertanam" akan jauh lebih punya kemungkinan untuk menjadi lebih adil daripada ekonomi-pasar yang "tercerabut" dari kebutuhan, kapasitas, potensi serta relasi sosial orang-orang biasa.

Kedua, tendensi "ketercerabutan" ekonomi-pasar dari kebutuhan, kapasitas, potensi produktif, serta relasi sosial orang-orang biasa bukan hanya karena tiadanya kaitan antara corak pertumbuhan ekonomi-pasar dan kondisi hidup orang biasa. "Ketercerabutan" itu juga dapat dikenali dari sejauh mana bidang-bidang seperti hukum, politik, pendidikan, kesehatan, dsb dikolonisasi oleh prinsip dan logika ekonomi-pasar, sedemikian rupa sehingga akses pada kebutuhan-kebutuhan paling dasar itu bukan lagi merupakan 'hak', tetapi tergantung pada 'daya-beli'. Lantaran orang miskin adalah kaum yang per definisi berdaya-beli rendah, mereka akan "terkutuk" dalam akses yang rendah pula pada kebutuhan-kebutuhan hidup yang paling mendasar itu. Ekonomi-pasar "tercerabut" bukan karena ia sistem ekonomi yang buruk, tetapi karena aplikasi prinsipnya ke semua bidang lain justru telah membuat genius ekonomi-pasar berubah menjadi alat "perusak" bagi kemungkinan tata hidup bersama.<sup>23</sup>

Ketiga, kendati refleksi filosofis se-sederhana ini tidak berambisi menjadi aplikatif, *insight* yang dapat ditarik dari dua pokok di atas rupanya menunjuk pada visi programatik berikut ini. Meskipun 'keadilan' adalah konsep yang elusif (*elusive*), gerakan/kebijakan ke arah ekonomi yang mungkin bisa mendekati ciri berkeadilan dalam konteks Indonesia berisi dua arah agenda, yaitu [a] "menanam kembali" ekonomi-pasar dalam kebutuhan, kapasitas, potensi serta relasi sosial orang-orang biasa, dan [b]

<sup>23</sup> Bandingkan, misalnya, dengan: "Free play of economic factors and laws is possible only in a community that is dead and is decomposing, while in a living community that has a future, economic elements are correlated with and determined by moral ends. To proclaim laissez faire, laissez passer is to say to society 'die and decompose'." (Vladimir Solovyov, *The Justification of the Good*, Michigan: W. B. Eerdmans, [1897] 2005, hlm. 284). Atau, "Once a social system, such as capitalism, convinces everyone that it can dispense with morality and public spirit, the universal pursuit of self-interest being all that is needed for satisfactory performance, the system will undermine its own viability, which is in fact premised on civic behavior and on the respect of certain moral norms to a far greater extent than capitalism's official ideology avows" (Fred Hirsch, ekonom, sebagaimana dikutip dalam Albert O. Hirschman, *Rival Views of Market Society and Other Essays*, London: Penguin, 1986, hlm. 156).

mencegah kolonisasi bidang-bidang lain yang menyangga tata hidup bersama (seperti pendidikan, kesehatan, hukum, politik, dsb) oleh prinsip ekonomi-pasar.

Seperti halnya setiap analisis dari disiplin ilmu tertentu, refleksi filosofis ini juga sebuah bentuk *ceteris paribus*. Dan sebagaimana setiap tindakan *ceteris paribus*, banyak hal dan faktor lain terpaksa ditangguhkan (*suspended*), hanya supaya beberapa gagasan bisa diajukan. Namun, tentu saja arus nyata kondisi ekonomi-politik di Indonesia tidak mengenal *ceteris paribus*.

Maka, semoga sketsa kecil ini bermanfaat bukan karena telah menyatakan apa saja yang secara lengkap diajukan, tetapi karena menunjukkan beberapa hal yang secara terbatas telah diajukan. Selebihnya adalah gerakan.

Jakarta, 8 November 2007

© B. Herry-Priyono



# Ekonomi Pancasila: Dari Wacana ke Realita

Gunawan Sumodiningrat<sup>(\*)</sup>

## 1. Pendahuluan

Sesuai tema seminar dari Kepanitiaan kali ini yaitu *Pengembangan Kebijakan Ekonomi yang Berkeadilan bagi Semua: Cita-cita ke Realita* maka judul makalah kami sesuaikan seperti di atas. Makalah saya awali dari definisi terlebih dahulu. Dari definisi, kemudian kita sepakati permasalahannya. Bila sudah sepakat mari kita laksanakan, secara konsisten, dan akhirnya yang kita pikir selalu yang terbaik. Kita ucapkan, laksanakan, kendalikan, sehingga terealisasi.

Dalam hal ini Ilmu Ekonomi kita anggap sebagai suatu proses. Ekonomi adalah pembangunan, pembangunan adalah ekonomi. Keduanya adalah suatu proses bagaimana mewujudkan kesejahteraan rakyat. Rakyat adalah bahasa lain dari manusia. Manusia berkembang menjadi rakyat, rakyat berkembang menjadi masyarakat, masyarakat berkumpul menjadi warga, warga berkumpul menjadi warga desa, warga kecamatan, warga kabupaten, warga provinsi, warga negara, dan warga dunia. Ekonomi adalah ilmu yang mengatur rumah tangga dari manusia, manusia jadi rakyat, masyarakat jadi warga, dan seterusnya. Tujuannya adalah kesejahteraan. Kesejahteraan adalah sesuatu yang diperoleh dari proses ekonomi. Sejahtera itu kalau semua kebutuhannya terpenuhi. Kesejahteraan harus dicapai oleh manusia itu sendiri. Slogannya "Siapa yang menikmati adalah yang menghasilkan", itulah ekonomi yang sesungguhnya.

Sistem Ekonomi Pancasila adalah rancang bangun dari ekonomi nasional, yang dijiwai oleh sila-sila dalam Pancasila. Secara garis besar, Sistem Ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi yang berorientasi pada keadilan sosial dengan landasan utamanya adalah akhlak dan moral ke-Tuhanan, menekankan pada etika manusia yang beradab, menjunjung persatuan dan mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Konsep Ekonomi Pancasila, adalah normatif, yang setiap saat butuh penjabaran dan pemaknaan sesuai dengan tuntutan waktu. Menurut Sri Edi Swasono, Ekonomi Pancasila adalah pandangan filsafati di bidang kehidupan ekonomi sebagai implikasi langsung dari diterimanya Pancasila di negeri ini.

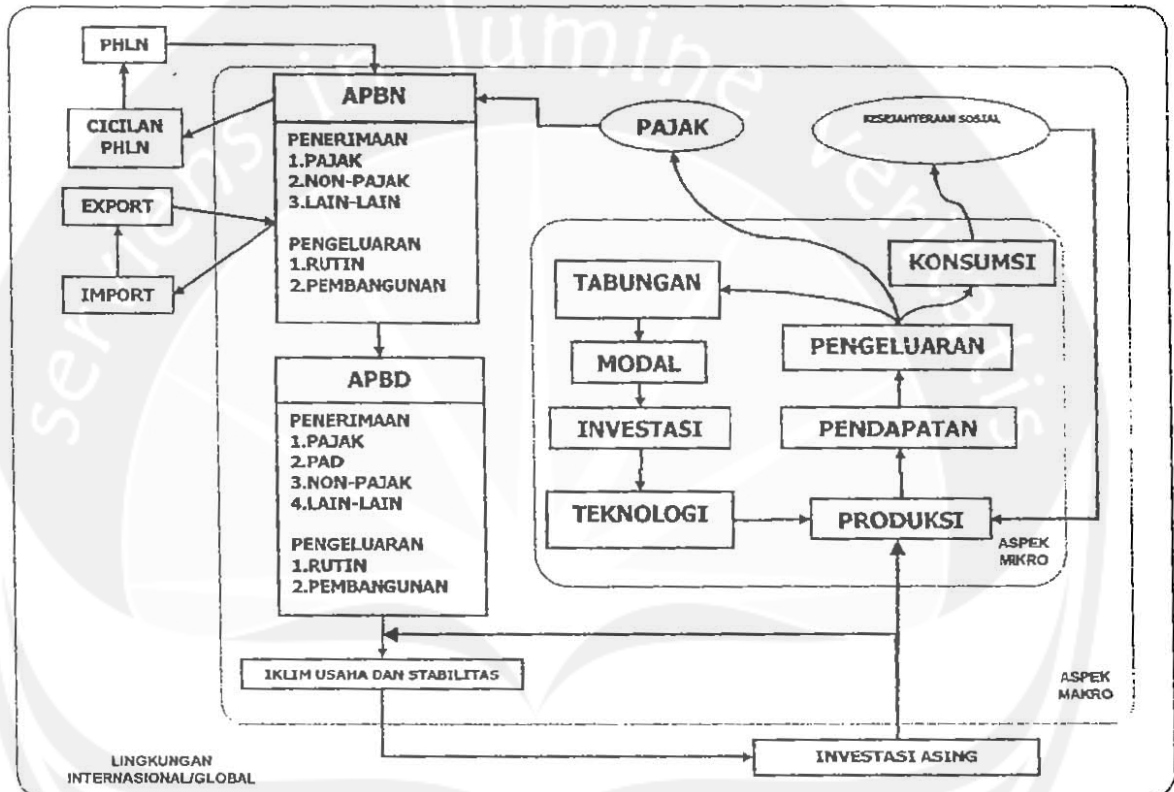
Penjabaran dan perwujudan secara kongkrit dari ekonomi Pancasila adalah pelaksanaan ekonomi masyarakat sesuai dengan tuntutan, kondisi dan aspirasi masyarakat Indonesia saat ini. Ekonomi masyarakat sesuai dituntunkan oleh ekonomi Pancasila dibentuk oleh tiga pilar utama, yaitu pertama, ideologi pembangunan ekonomi yaitu pancasila dan UUD 1945 sebagai moral dan etika pembangunan ekonomi Indonesia. Kedua, jiwa dan kondisi masyarakat Indonesia yang tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah juga APBN/APBD, yang memuat aspirasi dan kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap pembangunan ekonomi. Ketiga, adalah teori-teori pembangunan ekonomi masyarakat yang akan menjadi pedoman bagi pelaksanaan pembangunan ekonomi Indonesia.

Ekonomi masyarakat adalah bukan semata-mata ekonomi masyarakat kecil, yang dipisahkan dengan ekonomi masyarakat kelompok besar, atau ekonomi perdesaan yang dipisahkan dengan ekonomi perkotaan. Ekonomi masyarakat adalah suatu system ekonomi dimana seluruh lapisan masyarakat kelompok atau pelaku ekonomi dari yang kecil hingga yang besar dapat berperan serta aktif dan penuh. Yang dimaksud dengan penuh disini adalah tidak selalu sama, namun lebih menunjukkan pada makna optimal, adil, proporsional dan dapat berkembang. Untuk sampai kepada peran serta yang aktif dan penuh dari seluruh lapisan ekonomi dibutuhkan pemberdayaan pelaku ekonomi. Ekonomi masyarakat mengadakan

perubahan penting ke arah kemajuan khususnya ke arah pendobrakan ikatan serta halangan yang membelenggu bagian terbesar dari masyarakat Indonesia dalam keadaan serba kekurangan dan serba keterbelakangan.

Dalam tulisan ini akan dicoba mengulas tinjauan di lapangan mengenai penerapan Ekonomi Pancasila dalam upaya penanggulangan kemiskinan, dan salahsatunya menyangkut program di Departemen Sosial.

**Gambar 1:**  
Siklus Kegiatan Ekonomi (Aspek Mikro-Makro-Internasional/Global)



## 2. Ekonomi Pancasila

Dalam perspektif empiris teoritis, setiap ilmu terutama ilmu ekonomi harus dapat dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan tercapainya kesejahteraan masyarakat yang tumbuh dan berkembang secara adil dan merata. Teori ekonomi yang dirumuskan dari berbagai pengalaman pengelolaan kegiatan ekonomi terus berkembang sesuai dengan pemikiran dan peradaban manusia yang pada dasarnya mengutamakan atau memusatkan kepada manusia, baik sebagai makhluk individual maupun makhluk sosial dalam menjalankan fungsi dan peranannya sebagai pelaku ekonomi.

Asumsi dasarnya adalah yang menghasilkan, menikmati dan melestarikan dan tumbuh berkembang secara berkesinambungan. Asumsi ini tidak pernah terpenuhi bagi seluruh anggota masyarakat mengingat partisipasi, produktifitas dan efisiensi dari seluruh anggota masyarakat secara realitas tidak sama. Dalam perspektif empiris teoritis tentunya ada pelaku ekonomi yang sudah dapat mewujudkan tujuan ekonominya dan ada yang belum sehingga teori ekonomi terus tumbuh dan berkembang mengikuti dan menyesuaikan perkembangan masyarakat.

Dalam perspektif empiris teoritis, pengertian ekonomi berasal dari penggabungan dua suku kata Yunani yaitu *oikos* dan *nomos*. Arti *oikos* adalah rumah tangga sedangkan *nomos* berarti mengatur. Istilah "oikos" dan "nomos" pertamakali digunakan oleh Xenophone, salah seorang filsuf Yunani. Atas dasar pengertian tersebut, maka ilmu ekonomi diartikan sebagai ilmu tentang mengelola dan mengatur rumah tangga.

Tujuan pengelolaan rumah tangga ini adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup melalui tiga kegiatan utama, yaitu; produksi, distribusi dan konsumsi. Pemenuhan kebutuhan hidup dengan kendala terbatasnya sumber-sumber daya (*scarcity*) erat kaitannya dengan upaya meningkatkan kemakmuran (menyangkut aspek ekonomi) dan kesejahteraan (menyangkut aspek non ekonomi). Tingkat kemakmuran dan kesejahteraan ditentukan oleh kualitas dan kuantitas barang dan jasa, baik berupa barang konsumsi, barang produksi, barang habis pakai, barang tahan lama, maupun jasa-jasa termasuk di dalamnya kesehatan, pendidikan, sewa rumah, serta berbagai bentuk jasa pelayanan lainnya.

Kebutuhan konsumsi barang dan jasa hanya dapat dipenuhi jika tingkat pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan dari keikutsertaan dalam kegiatan produksi adalah tinggi. Tingkat rendahnya produksi dipengaruhi oleh pengeluaran untuk pengadaan berbagai faktor produksi. Semakin tinggi pendapatan, maka jumlah dan macam pengeluaran ini dapat terbeli disebabkan pendapatan rumah tangga tinggi. Semakin besar pengeluaran yang berarti pula pembelian dan pemilikan barang dan jasa menjadi semakin bertambah. Dengan demikian dapat bahwa masyarakat sebagai kumpulan dari rumah tangga telah mencapai kemakmuran dan sekaligus kesejahteraan yang semakin tinggi.

Sedangkan Sistem Ekonomi Pancasila secara umum dapat diartikan yang memadukan ideologi-konstitusional (Pancasila dan UUD 1945) bangsa Indonesia dengan Sistem Ekonomi Campuran (Sistem Ekonomi Pasar Terkelola) yang diwujudkan melalui kerangka demokrasi ekonomi serta dijabarkan dalam langkah-langkah ekonomi yang memihak dan memberdayakan seluruh lapisan masyarakat, yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya masyarakat yang adil dan makmur.

Ciri-ciri Sistem Ekonomi Pancasila menurut Emil Salim (Emil Salim, "Membangun Koperasi dan Sistem Ekonomi Pancasila", dalam Sri-Edhie Swasono, *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, Cetakan, Cetakan Kedua, 1987) adalah sebagai berikut:

*Pertama*, peranan negara beserta aparatur ekonomi negara adalah penting, tetapi tidak dominan agar dicegah tumbuhnya sistem etatisme (serba negara). Peranan swasta adalah penting, tetapi juga tidak dominan agar dicegah tumbuhnya *free fight*. Dalam Sistem Ekonomi Pancasila, usaha negara dan swasta tumbuh berdampingan dengan perimbangan tanpa dominasi berlebihan satu terhadap yang lain. Sistem ekonomi ini memuat dasar demokrasi ekonomi, sebagai satu sisi dan "mata uang demokrasi". Sisi lain adalah demokrasi politik. Hakikat demokrasi ekonomi adalah tersebar (dispersi) kekuatan ekonomi di masyarakat, dan tidak tersentralisasi di pusat atau terkumpul di beberapa tangan anggota masyarakat (monopoli dan oligopoli). Dalam konsep demokrasi ekonomi dan politik, hubungan politik dan ekonomi tidak vertikal, tetapi paralel horisontal.

*Kedua*, dalam Sistem Ekonomi Pancasila maka hubungan kerja antar lembaga-lembaga ekonomi tidak didasarkan pada dominasi modal, seperti halnya dalam Sistem Ekonomi Kapitalis. Juga tidak didasarkan pada dominasi buruh, seperti halnya dalam Sistem Ekonomi Komunis, tetapi asas kekeluargaan, menurut keakraban hubungan antar manusia. Hubungan seperti ini mengelak konfrontasi kepentingan antara modal *versus* buruh. Peranan manusia tidak ditentukan oleh besar-kecil modal yang dimiliki, atau tinggi-rendah upah yang diterima. Peranan manusia ditentukan oleh harkat dirinya selaku manusia. Karena itu pengembangan diri manusia memegang posisi sentral dalam pembangunan Sistem Ekonomi Pancasila. Arah pengembangan tertuju pada pembentukan manusia seutuhnya,

sebagai penjelmaan keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara kemajuan lahiriah dan batiniah, antara manusia dengan Tuhannya, antara manusia dengan masyarakat dan antara manusia dengan lingkungan alam. Ini memerlukan keselarasan dalam pengembangan iman, budi-pekerti dan rasio dalam diri manusia seutuhnya. Manusia seutuhnya adalah manusia berkualitas, yang bisa tumbuh berkembang dalam peri kehidupan berkualitas. Sebaliknya, kualitas hidup merupakan penciptaan dan manusia yang berkualitas.

*Ketiga*, masyarakat sebagai suatu kesatuan memegang peranan sentral dalam Sistem Ekonomi Pancasila. Produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Masyarakat adalah bagian dari unsur ekonomi non-negara, yakni ekonomi swasta. Dalam ekonomi swasta ini yang menonjol bukan perorangan (individual), tetapi masyarakat sebagai kesatuan yang melebihi jumlah orang perorangan. Tekanan kepada masyarakat tidak berarti mengabaikan individu. Tetapi langkah tindak individu harus serasi dengan kepentingan masyarakat. Masyarakat umum terbagi atas sub-sistem masyarakat petani, masyarakat nelayan, masyarakat buruh, masyarakat penawar jasa, dan sebagainya. Pengelompokan ini dipengaruhi oleh macam sumberdaya alam (*resources*) yang digunakan masyarakat ini masing-masing dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka yang penting dalam perkembangan sub-sistem masyarakat ini adalah terbukanya kesempatan memperoleh (*accessibility*) sumberdaya alam bagi kelompok masyarakat ini.

*Keempat*, negara menguasai bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi dan yang merupakan pokok bagi kemakmuran rakyat. Dalam melaksanakan "*hak menguasai*" ini perlu dijaga supaya sistem yang berkembang tidak menjerus ke arah etatisme. Oleh karena itu, "*hak menguasai oleh negara*" harus dilihat dalam konteks pelaksanaan hak dan kewajiban negara sebagai; (1) pemilik; (2) pengatur; (3) perencana; (4) pelaksana; dan (5) pengawas. Ramuan kelima pokok ini dengan bobot yang berlainan dapat menempatkan negara dalam kedudukannya untuk menguasai lingkungan alam, sehingga "*hak menguasai*" bisa dilakukan baik dengan memiliki sumberdaya alam, maupun tidak memiliki sumberdaya alam, namun mewujudkan hak menguasai itu melalui jalur pengaturan, perencanaan, dan pengawasan.

Sistem Ekonomi Pancasila tidak bebas nilai. Bahkan sistem nilai (*value system*) inilah mempengaruhi kelakuan pelaku ekonomi. Sistem yang dikembangkan bertolak dan ideologi yang dianut, dalam hal ini adalah ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila masih terus berkembang sesuai dengan dinamika pertumbuhan masyarakat, namun kelima sila secara utuh harus dijadikan *leitstar* (bintang pengarah), ke jurusan mana sistem nilai dikembangkan.

### 3. Penanggulangan Kemiskinan

Sistem Ekonomi Pancasila memang suatu yang ideal, sementara kita dihadapkan pada persoalan pembangunan seperti kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan. Negara juga harus mewujudkan tujuan kehidupan berbangsa seperti yang termaktub dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945.

Sesuai dengan Alinea IV Pembukaan UUD 45 maka fungsi penyelenggaraan pemerintahan Negara adalah

"...Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang mclindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasakan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, serta

dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia“

Ringkasnya tujuan penyelenggaraan pemerintahan Negara adalah melindungi segenap warga negara, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Maka penanggulangan kemiskinan menjadi kunci untuk memajukan kesejahteraan umum. Pemerintah telah menetapkan triple track untuk mengatasi persoalan kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan, yaitu dengan *employment*, *income*, dan *growth*. Dalam khasanah ekonomika pembangunan, ketiganya merupakan solusi untuk mengantar masyarakat agar bertransformasi struktural. Misalnya pendapat Harrod-Domar yang membahas 2 (dua) tahap perkembangan masyarakat yaitu dari tradisional ke modern (*underdevelopment* ke *developed communities*). Chennery yang berpendapat 3 (tiga) tahapan dari pertanian, industri, lalu ke jasa. Kemudian Rostow yang berasumsi 5 (lima) tahapan yaitu tradisional, pra-kondisi lepas landas, lepas landas, tahap konsumsi tinggi, dan masyarakat yang matang.

Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Depsos mengadaptasi hal ini dengan slogan “Kerja Untung Tabung” atau **Kutabung**. Bahwa bekerja akan mendatangkan keuntungan (*profit*) yang kemudian disimpan (*saving*) untuk kehidupan mendatang. Dengan Kutabung akan memunculkan warga yang mandiri, dan pastinya menjadi sejahtera. Hal ini relevan dengan slogan *triple track* Kabinet Indonesia yaitu *employment*, *income*, dan *growth*. Dengan semangat triple-track tersebut maka Pemerintah mempunyai target untuk mengurangi pengangguran, penanggulangan kemiskinan, dan memacu pertumbuhan

Sebenarnya tidak hanya Indonesia, kemiskinan menjadi problematika yang sangat kompleks bagi semua negara di dunia. Dalam kesepakatan global *Millenium Development Goals* atau MDGs, setiap negara diwajibkan untuk mengurangi tingkat kemiskinan hingga separuhnya pada periode 1990-2015.

Upaya ke arah pengurangan jumlah penduduk miskin telah lama diupayakan Pemerintah. Pemerintah RI mengeluarkan kebijakan penanggulangan kemiskinan dalam mengurangi jumlah penduduk miskin semenjak tahun 1961, yaitu melalui Pembangunan Nasional Berencana Delapan Tahun (Penasbede). Upaya penanggulangan kemiskinan waktu itu dilaksanakan pemerintah melalui strategi pemenuhan kebutuhan pokok rakyat (*basic needs*). Program ini mengalami kegagalan pada saat terjadi krisis politik dan transisi pemerintahan pada tahun 1965 – 1966.

Kemudian, setelah itu era Orde Baru melakukannya dalam kerangka trilogi pembangunan (pertumbuhan, pemerataan, dan stabilisasi). Orde Baru dalam hal ini paling berhasil mengangkat kondisi kehidupan ekonomi dan sosial di Indonesia secara sangat berarti. Penghasilan per kapita meningkat dari sekitar hanya USD 70 pada pertengahan 1960-an menjadi lebih dari USD 1000 pada pertengahan 1990-an. Prasarana yang langsung melayani masyarakat maupun yang mendukung kegiatan ekonomi dibangun secara luas. Kemiskinan menurun drastis dan berbagai indikator kesejahteraan sosial mulai dari harapan hidup, tingkat kecukupan gizi, tingkat kematian ibu dan anak, sampai ke tingkat partisipasi pendidikan, ketersediaan air bersih dan perumahan, semuanya menunjukkan perbaikan yang berarti. Indonesia menjadi contoh pembangunan yang sukses menurut versi Bank Dunia.

Tahun 1988-1998 program Pemerintah terus dimantapkan dengan pengembangan Kawasan Terpadu melalui Program Inpres Desa Tertinggal (IDT), Program Pengembangan Prasarana Desa Tertinggal (P3DT) dan berbagai program ad-

*hoc* penanggulangan kemiskinan pasca krisis (misalnya Padat Karya, dan Program Dalam rangka Menanggulangi Dampak Krisis Ekonomi /PDMDKE).

Pada tahun 1998-2006, upaya menghadapi krisis masih berlanjut dengan program penanggulangan kemiskinan berbasis masyarakat di berbagai sektor, meliputi: Program Pengembangan Kecamatan atau PPK, Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan atau P2KP, P2MPD, WSSLIC, KPEL dan Jaring Pengaman Sosial (JPS).

Sejalan dengan pemahaman terhadap permasalahan yang dihadapi dan sesuai aspirasi masyarakat maka program penanggulangan kemiskinan terus dimantapkan. Mulai tahun anggaran 2007 program penanggulangan kemiskinan dikonsolidasikan ke dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Sedangkan perbaikan terhadap program Bantuan Langsung Tunai (BLT) diupayakan pada tahun ini melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Bagan 1 berikut merupakan ringkasan dari program-program penanggulangan kemiskinan yang pernah dilakukan Pemerintah.

**Bagan 1:**  
**PERKEMBANGAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

- **1974-1988:**  
Berbagai program sektoral: Pertanian (BIMAS, INMAS, KUK, transmigrasi), Industri (industri padat karya, al. tekstil & kayu lapis), berbagai kebijakan Inpres (Desa, Kabupaten, Propinsi, Jalan, Irigasi, dll).
- **1988-1998:**  
Pengembangan Kawasan Terpadu (PKT) → Inpres Desa Tertinggal (IDT), Program Pengembangan Prasarana Desa Tertinggal (P3DT) dan berbagai program *ad-hoc* penanggulangan kemiskinan pasca krisis (Padat Karya, PDMDKE, *Community Recovery Program*).
- **1988-1998:**  
Pengembangan Kawasan Terpadu (PKT) → Inpres Desa Tertinggal (IDT), Program Pengembangan Prasarana Desa Tertinggal (P3DT) dan berbagai program *ad-hoc* penanggulangan kemiskinan pasca krisis (Padat Karya, PDMDKE, *Community Recovery Program*).
- **1998 – 2005:**  
Program penanggulangan kemiskinan berbasis masyarakat di berbagai sektor: PPK, P2KP, P2MPD, WSSLIC, KPEL, dll. Dalam kerangka program mengatasi dampak krisis: Jaring Pengaman Sosial (JPS). Pada tahun 2005 untuk mengatasi kenaikan BBM diselenggarakan program Bantuan Langsung Tunai.
- **2006:**  
Program-program sektoral diupayakan untuk dikoordinasi dalam payung Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Untuk tahun awal diadaptasi sebanyak 2 program yaitu PPK dan P2KP.
- **2007:**  
Dimunculkan Program Keluarga Harapan atau PKH sebagai *conditional cash transfer*. Untuk *economically active poor* diselenggarakan program BLPS dari Departemen Sosial

Program-program penanggulangan kemiskinan yang selama ini diselenggarakan Pemerintah adalah Proyek Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil (P4K) di Departemen Pertanian; Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UEDSP) di Depdagri; Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT) di Depdagri; Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Depdagri; Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Kementerian PU; Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Departemen Kelautan dan Perikanan; Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di BKKBN, Program Peningkatan Usaha Ekonomi Perempuan (P2UEP) di Kementerian Perempuan; Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Departemen Sosial.

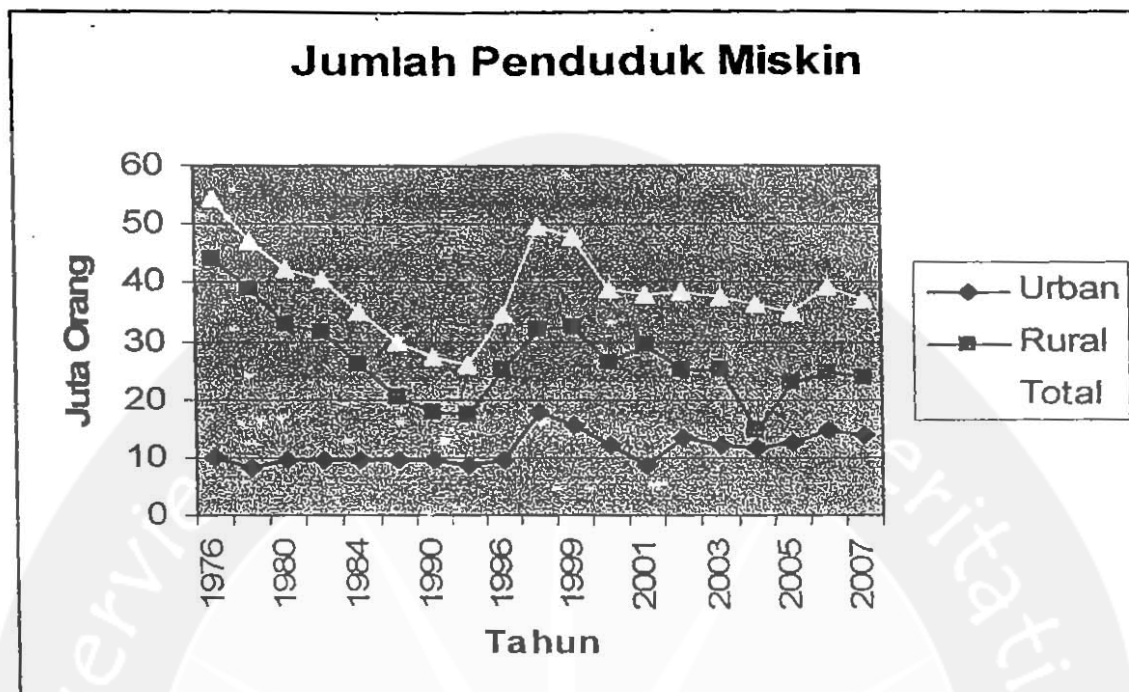
### 3.1 Jumlah Penduduk Miskin

Selama periode 1976-1996, jumlah penduduk miskin turun secara drastis. Jumlah penduduk miskin yang pada tahun 1976 sekitar 54,2 juta jiwa (40,1 persen), turun menjadi 40,6 juta jiwa (26,9 persen) pada tahun 1981. Jumlah ini kembali menurun menjadi 27,2 juta jiwa (15,1 persen) pada tahun 1990, dan mencapai titik terendah pada tahun 1996, yakni menjadi sekitar 22,4 juta jiwa atau sekitar 11,3 persen dari total penduduk miskin.

Namun, penurunan tersebut masih sangat rentan terhadap berbagai perubahan situasi dan kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam. Terbukti ketika krisis ekonomi yang berubah menjadi multidimensi melanda Indonesia pada pertengahan 1997, jumlah penduduk miskin kembali meningkat tajam.

Pada tahun 2007 menurut Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat 37,17 juta jiwa penduduk miskin atau 16,58 persen penduduk Indonesia. Sedangkan menurut Kementerian Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (2006) terdapat lebih dari 43 persen kabupaten/kotamadya atau 190 kabupaten/kotamadya dari 440 kabupaten/ kotamadya di Indonesia yang masuk dalam kategori daerah miskin atau tertinggal. Bagian terbesar, sekitar 63 persen, berada di kawasan timur Indonesia, 28 persen di Sumatera, dan 8 persen di Pulau Jawa dan Bali. Hal tersebut mengindikasikan bahwa sekitar 67 persen atau 120 kabupaten dari 180 kabupaten/kota di kawasan timur Indonesia merupakan daerah miskin. Perkembangan jumlah penduduk miskin ditunjukkan dalam tabel 1 sebagai berikut.

Tabel 1: Jumlah Penduduk Miskin



#### 4. Reinventing Departemen Sosial

Dari paparan diatas dapat disimpulkan Pemerintah telah bekerja keras mengurangi kemiskinan, meski jumlah kemiskinan masih tinggi. Pemerintah telah berhasil mengurangi kemiskinan menjadi 37,17 juta jiwa penduduk miskin atau 16,58 persen penduduk Indonesia (tahun 2007) dengan mempergunakan garis kemiskinan Rp 166.697 per bulan. Jumlah ini menurun sebanyak 2,13 juta orang dibandingkan tahun 2006. Apabila ditarik ke tujuan akhirnya, Pemerintah –dalam hal ini Kabinet Indonesia Bersatu (KIB)- menargetkan pada tahun 2009 jumlah penduduk miskin hanya berkisar 8,2 persen (dari 16,6 persen pada tahun 2004).

Sehingga diperlukan semacam penyegaran kebijakan penanggulangan kemiskinan, agar lebih tepat dan terarah dalam mengurangi jumlah penduduk miskin. Di Departemen Sosial hal tersebut dikenal dengan strategi reinventing yang terdiri dari 5 (lima) kebijakan. Strategi Reinventing yang diperkenalkan Menteri Sosial pada bulan Februari 2006 merupakan program yang mengarah kepada pembangunan kesejahteraan sosial, yaitu: 1. Reorientasi, 2. Restrukturisasi, 3. Aliansi, 4. Implementasi, 5. Monitoring-Evaluasi.

Reorientasi adalah pemantapan tujuan pembangunan kesejahteraan sosial yang lebih tertuju ke pemberdayaan (*empowerment*) dibanding pemberian (*charity*) semata. Restrukturisasi adalah pemilihan struktur organisasi yang diisi oleh orang-orang profesional. Aliansi adalah keberanian kita untuk *go-global* dengan tidak meninggalkan koordinasi lintas sektor dan lintas regional. Ketiga langkah tersebut diimplementasikan dengan menggali, mempertahankan dan mengembangkan modal sosial, termasuk kearifan lokal. Nilai-nilai sosial budaya, seperti kesetiakawanan sosial, wawasan kebangsaan, dan gotong royong, dioptimalkan sebagai modal dasar dalam menciptakan tanggung jawab sosial.

## **5. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial**

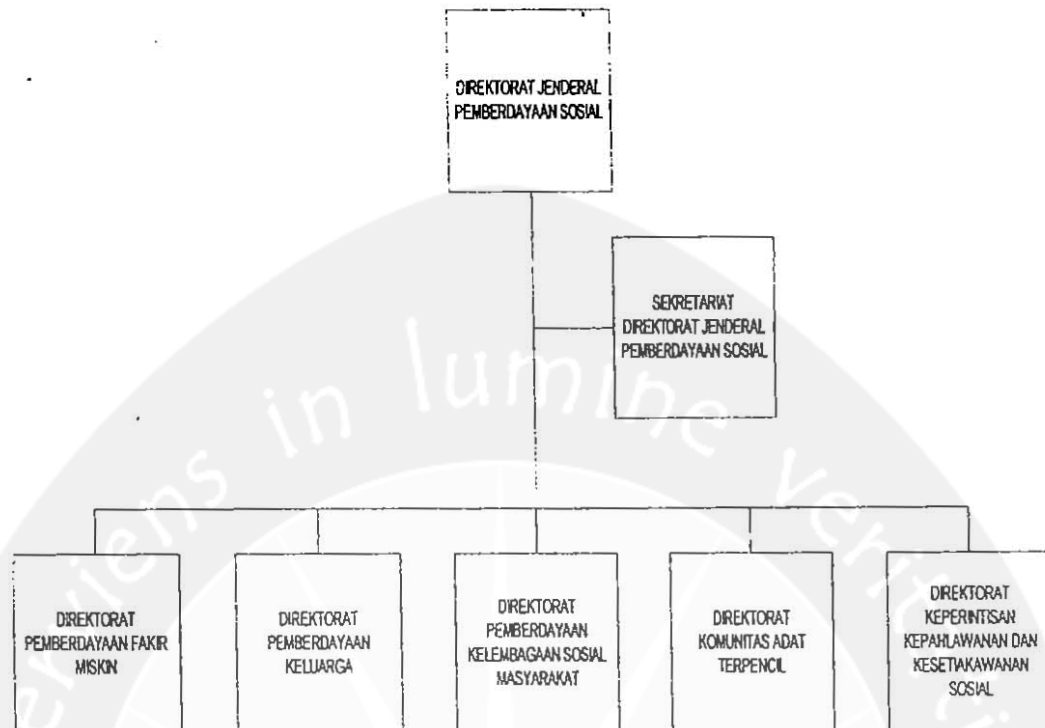
Kelima strategi tersebut berusaha diwujudkan oleh jajaran Depsos –baik di tingkat Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan 3 (tiga) Direktorat Jenderal serta Badan Pendidikan dan Penelitian. Ketiga direktorat mewakili upaya dalam penanggulangan kemiskinan –yakni mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui penambahan produktifitas.

Kedua upaya di atas diarahkan kepada kelompok sasaran 15-60 tahun dengan meningkatkan produktifitas masyarakat terutama ditujukan kepada kelompok miskin usia produktif (15-60 tahun) sebagai tugas Ditjen Pemberdayaan Sosial. Sedangkan pengurangan beban pengeluaran ditujukan kepada usia belum-produktif (di bawah 15 tahun) sebagai tugas Ditjen Pelayanan Rehabilitasi Sosial, dan pasca-produktif (di atas 60 tahun) sebagai tugas Ditjen Bantuan dan Jaminan Sosial. Diperlukan aliansi untuk meningkatkan koordinasi, kolaborasi dan jejaring kerja di intern Depsos. Dalam hal ini Ditjen Pemberdayaan Sosial, Ditjen Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial serta Ditjen Bantuan dan Jaminan Sosial bertindak sebagai ujung tombaknya. Difasilitasi oleh Sekretariat Jenderal serta diawasi kinerja dan akuntabilitasnya oleh Inspektorat Jenderal. Kemudian dievaluasi, dinilai dampaknya serta dimonitor keberhasilan kinerjanya oleh Badan Pendidikan dan Penelitian, yang mendapatkan saran masukan dari Staf Ahli.

Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial mempunyai kekhususan tupoksi dibanding departemen lain yaitu menangani KAT, terutama KAT di perbatasan antar negara. Tahun depan KAT ini akan diberdayakan melalui program Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS). Ditjen Dayasos selama ini telah berkoordinasi dengan 9 provinsi yang memiliki KAT dan berbatasan langsung dengan negara tetangga. Kesembilan provinsi itu adalah 1. Kalbar, 2. Kaltim, 3. NTT (Kabupaten Belau), 4. Sulawesi Utara (pulau Miangas), 5. Kepulauan Riau, 6. Sulawesi Utara, 7. Maluku, 8. Maluku Utara, dan 9. Papua.

Sedangkan pemberdayaan sosial meliputi pemberdayaan fakir miskin, pemberdayaan keluarga, pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat, pemberdayaan komunitas adat terpencil, serta program kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.

## STRUKTUR ORGANISASI DITJEN PEMBERDAYAAN SOSIAL



Pemberdayaan mengandung makna adanya partisipasi seluruh sasaran pelayanan dan komunitas sekitarnya serta masyarakat umumnya; adanya pendelegasian wewenang kepada daerah dalam menyusun rencana, melaksanakan dan mengendalikan program pembangunan kesejahteraan sosial; adanya peningkatan kemampuan sasaran pelayanan; serta aktualisasi peran-peran kelembagaan sosial masyarakat dan swasta dalam mengkoordinasikan pelaksanaan program pembangunan kesejahteraan sosial bersama-sama pemerintah. Strategi pemberdayaan digunakan dalam pelaksanaan program pembangunan kesejahteraan sosial dilaksanakan karena tersedianya potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang belum didayagunakan secara optimal.

Pemberdayaan dapat dilakukan dengan menggali kemampuan sasaran pelayanan, mendayagunakan potensi dan sumber yang tersedia di masyarakat dengan memberikan pelatihan ketrampilan, pendampingan dan bimbingan sosial serta pengembangan usaha ekonomi produktif dan usaha kesejahteraan sosial. Semakin lama semakin disadari bahwa program penanggulangan kemiskinan tidak boleh hanya *charity* semata, namun selanjutnya harus diikuti dengan langkah pemberdayaan dalam penanganan kemiskinan guna memperkuat keberfungsian sosial seseorang. Disini kami menekankan bahwa 'dari belas kasihan menjadi kasih sayang'.

Slogan yang ditekankan dalam aspek pemberdayaan sosial adalah "Kerja Untung Tabung" atau **Kutabung**. Bahwa bekerja akan mendatangkan keuntungan (*profit*) yang kemudian disimpan (*saving*) untuk kehidupan mendatang. Dengan Kutabung akan memunculkan warga yang mandiri. Hal ini relevan dengan slogan *triple track* Kabinet Indonesia yaitu *employment, income, dan growth*. Dengan semangat triple-track tersebut maka Pemerintah mempunyai target untuk mengurangi pengangguran, penanggulangan kemiskinan, dan memacu pertumbuhan.

## 6. Upaya Mewujudkan Ekonomi Pancasila: BLPS

Pengurangan kemiskinan di atas tersebut merupakan bagian dari 2 (dua) kebijakan lainnya, yaitu mengurangi pengangguran dari 9,5 persen pada tahun 2003 menjadi 6,7 persen di tahun 2009, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari 4,5 persen pada tahun 2003 menjadi 7,2 persen di tahun 2009. Sebesar 1% pertumbuhan ekonomi akan mengurangi pengangguran sebanyak 250 ribu orang. Sedangkan menurut Kementerian Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (2006) terdapat lebih dari 43 persen kabupaten/kotamadya atau 190 kabupaten/kotamadya dari 440 kabupaten/ kotamadya di Indonesia yang masuk dalam kategori daerah miskin atau tertinggal. Bagian terbesar, sekitar 63 persen, berada di kawasan timur Indonesia, 28 persen di Sumatera, dan 8 persen di Pulau Jawa dan Bali.

Hal tersebut di atas mengindikasikan bahwa sekitar 67 persen atau 120 kabupaten dari 180 kabupaten/kota di kawasan timur Indonesia merupakan daerah miskin. Depsos c.q Ditjen Pemberdayaan Sosial berupaya menurunkan kesenjangan dengan program BANTUAN LANGSUNG PEMBERDAYAAN SOSIAL atau BLPS, kepada 33 Provinsi dan 99 Kabupaten/ Kota. Dengan BLPS kepada KUBE (Kelompok Usaha Bersama) yang ada maka diharapkan dalam satu Kecamatan terdapat satu pusat pertumbuhan.

Pemberdayaan Sosial di dalam kerangka Struktur Organisasi dan Tata Kerja atau SOTK Departemen Sosial diartikan sebagai proses pemberian penguatan dan kemampuan kepada anggota KUBE dalam mengelola Usaha Ekonomi Produktif yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Untuk tahun 2007, Departemen Sosial akan menyelenggarakan program Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS). *Trademark* dari program pemberdayaan sosial tersebut adalah keberadaan Manajer Sosial Kecamatan atau disingkat dengan **Maskot**. Dahulu Depsos memiliki petugas teknis yang langsung berhubungan dengan masyarakat, yaitu Petugas Sosial Kecamatan. Namun keberadaan PSK tersebut tidak *sustain* atau tak bertahan lama. Stigma pada singkatan PSK diperbaiki kembali dengan adanya MSK ini. MSK ataupun PSK merupakan perangkat Depsos untuk mendampingi masyarakat. Dengan BLPS maka kami di Depsos berupaya menyegarkan kembali peran pendamping melalui *training of trainer* kepada Karang Taruna, Petugas Sosial Kecamatan, Organisasi Sosial, dan Pekerja Sosial Masyarakat dalam menyukseskan program Pemerintah di daerah. Tujuannya adalah membuat wilayah Kecamatan sebagai pusat pertumbuhan, seperti yang telah.

Ditjen Dayasos memandang walaubagaimanapun program tetap membutuhkan peran Pendamping. Pendamping mempunyai tugas utama untuk 'mengingat'. Kita hanya mengingatkan saja –karena masyarakat merupakan aktor utama pembangunan. Pendamping merupakan bagian dari kelompok pembaharu yang mengingatkan agar masyarakat miskin tidak boleh selalu tergantung kepada program pemerintah. Dia harus berdaya, kudu mampu dan mulai berkenalan dengan pasar, itulah kemudian peran pendamping yang *advance* yaitu Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB).

Melalui BLPS tersebut Departemen Sosial pada tahun 2007 ini berupaya menyegarkan kembali peran pendamping melalui *training of trainer* kepada Karang Taruna, Petugas Sosial Kecamatan, Organisasi Sosial, dan Pekerja Sosial Masyarakat dalam menyukseskan program Pemerintah di daerah. Tujuannya adalah membuat wilayah Kecamatan sebagai pusat pertumbuhan. Pendamping berlabel Manajer Sosial Kecamatan atau Maskot nantinya akan mendampingi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang akan diterjunkan di 198 kecamatan. Satu kecamatan bisa memilih 2-5 desa dan satu desa dapat memilih 10 KUBE dengan anggota masing-masing 10 orang. Untuk 33 provinsi tersebut disediakan anggaran Rp 162 milyar dengan demikian

setiap kabupaten akan mendapat sekitar Rp 1,2 M atau Rp 500-600 juta per kecamatan dan Rp 100 juta per desa.

Kelengkapan sebagai seorang 'pemberdaya masyarakat' akan lebih multi fungsi bila ditambahkan dengan perangkat keras seperti handphone dan laptop sehingga kecepatan dan keakuratan data lebih terjamin. Sedangkan perangkat lunak dari MSK ini adalah konsep pemberdayaan dalam kerangka *intelektual, spiritual, dan emotional*. Konsep intelektual meliputi tersebut meliputi kepemimpinan atau *leadership* sedangkan konsep spritual adalah wawasan kebangsaan, dan konsep emosional ialah ekonomi Pancasila. Kepemimpinan arahnya pada *Bhinneka Tunggal Ika, tan hanna dharmwa mangrva* yang menanamkan sikap nasionalisme dan cinta tanah air. Jadi kita perlu menanamkan lagi sikap penyadaran bahwa meski berbeda kita tetap harus satu, tiada kebaikan yang mendua.

Spiritual berfokus pada makna Asta Brata yaitu 8 (delapan) sifat alam. Dalam falsafah Jawa pun dikenal nilai-nilai "*Asta Brata*", dimana pemimpin justru harus memberikan teladan kepada rakyat melalui penghayatan sifat-sifat alam ke dalam praktek kehidupan sehari-hari. Sifat-sifat alam yang patut diambil hikmahnya itu adalah

1. sifat matahari yang memberi semangat,
2. sifat rembulan yang memberi pembinaan,
3. sifat bintang yang memberikan arah hidup,
4. sifat angin yang mampu menyelami kehidupan rakyat,
5. sifat mendung yang memberikan pengayoman,
6. sifat api yang "tegas" dan "teges",
7. sifat air yang adil, mempunyai pandangan luas, dan
8. sifat bumi yang jujur

Sasaran pelaksanaan program ini adalah kelompok masyarakat miskin yang masih produktif dan telah memiliki usaha ekonomi produktif. Mereka ini telah diwadahi dalam Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan telah diseleksi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan melalui SK Bupati/Walikota. Dalam realitas banyak anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang kurang memiliki modal dalam pengembangan atau perluasan jenis usaha yang akan dikelola. Sementara akses ke sumber pendanaan seperti lembaga perbankan belum dapat dijangkau oleh KUBE, karena berbagai persyaratan belum dapat dipenuhi seperti adanya agunan atau jaminan. Ketidak siapan KUBE dalam memenuhi persyaratan dalam mengakses sumber perbankan, membuat mereka tidak mampu meningkatkan produktivitasnya dan cenderung mengalami stagnasi. Kondisi seperti ini mengakibatkan kelompok masyarakat yang tidak mampu menciptakan berbagai kesempatan kerja untuk mengurangi pengangguran seperti yang terjadi saat ini.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin akan memberikan jaminan permodalan usaha yang mampu memfasilitasi kelompok fakir miskin yang telah diwadahi dalam Kelompok Usaha Bersama (KUBE) untuk mengelola Usaha Ekonomi Produktif (UEP) melalui Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS). Dalam pelaksanaan di lapangan Departemen Sosial RI akan bekerjasama dengan pihak PT. Bank BRI (Persero) Tbk untuk memfasilitasi KUBE untuk mendapatkan modal usaha dengan berbagai kemudahan-kemudahan atau fasilitas tertentu.

Pemberian jaminan pengaksesan modal usaha oleh Departemen Sosial RI, merupakan peluang yang besar bagi KUBE dalam rangka mengembangkan dan memperbesar produktivitasnya. Disamping mendapatkan pinjaman permodalan, KUBE juga dapat meningkatkan kualitas mutu produknya melalui berbagai

pelatihan yang akan difasilitasi oleh pihak perbankan dan konsultan pendamping. Keterlibatan pihak PT. Bank BRI (Persero) Tbk dapat mempermudah anggota KUBE untuk mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah yang mereka hadapi dan sekaligus sebagai bukti kongkrit peran aktif dan kepedulian PT. Bank BRI (Persero) Tbk dalam menanggulangi kemiskinan. Disisi lain PT. Bank BRI (Persero) Tbk akan memberikan kredit komersial terhadap KUBE-KUBE tertentu yang memiliki prospek baik dari sumber dana Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) atau Corporate Social Responsibility (CSR).

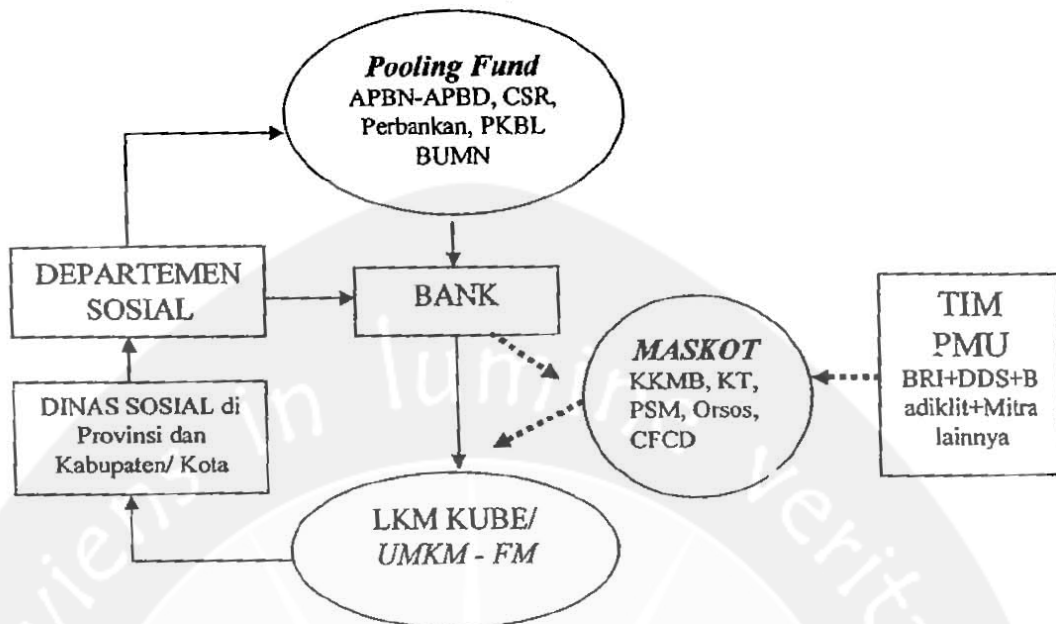
Dalam rangka implementasi program pemberdayaan fakir miskin melalui Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial diperlukan pemahaman dan koordinasi antar instansi yang terkait. Oleh karena itu dipandang perlu adanya Petunjuk Operasional sebagai acuan atau pedoman semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan program.

Masyarakat Miskin sebagai sasaran program dalam BLPS adalah adalah masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap pelayanan sosial dasar dan masuk kategori penerima SLT (kriteria BPS). Sedangkan fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan.

Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE-FM) adalah himpunan dari keluarga yang tergolong fakir miskin yang dibentuk, tumbuh dan berkembang atas dasar prakarsanya sendiri, saling berinteraksi antara satu dengan lainnya, dan tinggal dalam satu wilayah tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan produktifitas anggotanya, meningkatkan relasi sosial yang harmonis, memenuhi kebutuhan anggota, memecahkan masalah sosial yang dialaminya, dan menjadi wadah pengembangan usaha bersama.

Jajaran Depsos pada tahun ini akan fokus pada pendampingan KUBE melalui Maskot tersebut. Setelah para pendamping telah dipimpin oleh Dinas Sosial daerah, baru kemudian pada Maskot memilih Kube. Keberadaan Maskot diharapkan sebagai koordinator permasalahan sosial di tingkat kecamatan. Gaji pendamping ini pada tahun pertama dianggarkan dari APBN lembaga Depsos, tahun kedua dari APBD dan selanjutnya bisa diambilkan dari anggaran untuk Kube yaitu 5 %.

**Gambar 2: Alur Program BLPS**



**Keterangan:** ① Manager Sosial Kecamatan (MASKOT) untuk pendampingan oleh Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Organisasi Sosial (Orsos), dan *Corporate Forum on Community Development* (CFCD). ② PMU adalah Project Management Unit untuk memantau Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial terdiri dari Ditjen Pemberdayaan Sosial (Dayasos atau DDS), Badan Pendidikan dan Penelitian (Badiklit) Depsos, Perbankan (misalnya PT Bank BRI), dan mitra lainnya. ③ Optimalkan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sebagai bagian kelompok Usaha Mikro Kecil Menengah Fakir Miskin (UMKM FM) ④ Semangat: Bersama harus bisa

## 7. Penutup

PEMERINTAH tidak dapat bekerja sendiri dalam menyelesaikan seluruh permasalahan berbangsa dan bernegara. Penanggulangan kemiskinan bukan hanya merupakan monopoli pemerintah dengan berbagai departemen sektoralnya, namun kemiskinan merupakan permasalahan multidimensi yang menjadi tanggung jawab seluruh unsur bangsa Indonesia. Pemerintah tidak akan mampu menjadi pemain tunggal dalam menanggulangi kemiskinan, karena memiliki berbagai keterbatasan, baik dalam aspek manajemen, organisasi, maupun keuangan. Penanggulangan kemiskinan harus dilaksanakan secara menyeluruh (lintas sektor dan lintas regional) dengan melibatkan forum lintas pelaku. Sementara itu, arah penanggulangan kemiskinan ditujukan pada pemberdayaan dan pengembangan kapasitas serta potensi masyarakat miskin, sehingga mereka dapat terlepas dari kemiskinan secara mandiri dan berkelanjutan.

Maka upaya untuk mempercepat tumbuh dan berkembangnya ekonomi Indonesia serta mengurangi kemiskinan –dalam kerangka Ekonomi Pancasila- adalah “Bersama Membangun Bangsa”. Bekerjasama dengan BUMN dan swasta maka kita perlu mengoptimalkan CSR atau *corporate social responsibility* dalam upaya mengembalikan pusat ekonomi kepada rakyat: pembangunan dari-oleh-untuk Rakyat di Daerah. Lebih tepatnya Kecamatan sebagai pusat pertumbuhan. Strateginya adalah pemberdayaan masyarakat, langkahnya melalui Kutabung. Mari bekerja, raih keuntungan, dan sisihkan untuk menabung –demi masa depan yang lebih baik.

Kondisi pada saat ini –seperti yang dikutip dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) melalui laporannya “Inventarisasi Program-program penanggulangan Kemiskinan” tahun 2002- menyatakan bahwa terdapat beberapa kelemahan program selama ini yaitu banyak pengkategorian yang sebenarnya berbeda dengan tujuan penanggulangan kemiskinan. Seperti kelompok sasaran yang tidak ke usia produktif (15-55 tahun), adanya program yang bersifat pemberian bantuan (*charity*, karitatif), dan tumpangtindihnya program lintas sektor lintas regional.

Kondisi yang diinginkan adalah paradigma pemberdayaan yang menjadi ‘ruh’ penanggulangan kemiskinan, kemudian terkikisnya ego sektoral, dan koordinasi yang rapi lintas sektor dan lintas regional. Sehingga tidak saatnya lagi kita hanya ‘memberi’ kepada orang miskin, tapi harus kita berdayakan. Beri mereka kepercayaan untuk mengelola modal dalam rangka mengembangkan usaha. Beri kesempatan untuk berkompetisi di pasar, dan bergaul dengan indah bersama perbankan. Perlakukan mereka secara sama dalam kesempatan berusaha. ★

---

(\*) **Prof. Gunawan Sumodiningrat, M.Ec., Ph.D.**, adalah Guru Besar Ekonomi di Universitas Gadjah Mada, yang sejak Februari 2006 menjabat sebagai Dirjen Pemberdayaan Sosial Departemen Sosial RI. Setiap Sabtu masih mengajar mata kuliah Perekonomian Indonesia untuk mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi UGM di Yogyakarta. Makalah ini disampaikan dalam rangka Seminar yang diselenggarakan oleh Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) dan Universitas Sanata Dharma (USD) Yogyakarta, bekerjasama dengan Ikatan Sarjana Katolik Indonesia Korda DIY, di Ruang Seminar FE UAJY, Jalan Babarsari, Yogyakarta.

## Bahan Bacaan

(dari penulis yang sama)

**Sistem Ekonomi Pancasila dalam Perspektif**, Impac Wahana Cipta, Jakarta, 1999

**Membangun Indonesia Emas**, Elexmedia Komputindo, Jakarta, 2006

**Pemberdayaan Sosial**, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2007

# **Orientasi Kebijakan Ekonomi Indonesia<sup>1</sup>**

**R. Maryatmo<sup>2</sup>**

## **1. Pendahuluan**

Tulisan ini mengkaji orientasi kebijakan ekonomi Indonesia. Orientasi kebijakan pemerintah biasanya dikategorikan dalam dua kutub ekstrem yakni kebijakan pro pasar dan kebijakan yang pro non pasar. Berbagai topik yang akan dibahas sebagai bagian dari peran pemerintah dalam hal ini adalah 1) perencanaan dan komunikasi pembangunan; 2) anggaran pemerintah; 3) stabilitas dan efisiensi di sektor moneter; 4) kepemilikan sektor-sektor yang menyangkut hajat hidup orang banyak; 5) aturan eksploitasi kekayaan alam; 6) Namun sebelum beranjak membahas sub topik di atas kita akan mencoba mencermati definisi, kekuatan dan kelemahan pasar.

Kajian mengenai peranan pemerintah di sini sangat menarik, karena berbagai hal. Pertama, masalah pengangguran, kerusakan lingkungan, pertumbuhan ekonomi yang rendah, serta ketimpangan perekonomian di Indonesia dikaitkan dengan kegagalan peran pemerintah dalam perekonomian. Kedua, di sisi lain campur tangan pemerintah dalam perekonomian mendapat legitimasi, karena sistem pasar mendapat hujatan dari para pakar sosial. Jika pasar tidak dikehendaki, berarti pemerintah harus ambil peranan. Ketiga, efektifitas kebijakan pemerintah terhadap perekonomian berbeda antar negara. Keempat, ada ketidaksepeahaman mengenai efektifitas kebijakan pemerintah, bahkan dalam tataran teori sekalipun.

## **2. Teori Pasar dan Pemerataan**

Pasar adalah kekuatan tarik menarik antara permintaan dan penawaran. Mekanisme pasar adalah mekanisme yang paling efisien dan paling murah dalam mengalokasikan barang dan jasa (Samuelson, 2005)<sup>1</sup>. Mekanisme pasar menjamin tercapainya hasil yang fair, tetapi tidak menjamin terjadinya pemerataan. Dalam mekanisme pasar yang paling sempurna, distribusi dan alokasi sumberdaya tercapai

---

<sup>1</sup> Tulisan ini disajikan dalam Seminar Nasional "Pengembangan Kebijakan Ekonomi Yang Berkeadilan Bagi Semua: Cita-Cita dan Realita", Yang diselenggarakan oleh ISKA Korda DIY, Kamis 8 November 2007

<sup>2</sup> Dosen Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dan peneliti dalam bidang kajian usaha kecil menengah dan kebijakan fiskal moneter

dengan adil, tetapi tidak merata, karena pemerataan ditentukan juga oleh kepemilikan kekayaan (*endowment*).

Dalam kenyataannya pasar penuh ketidaksempurnaan, sehingga “mungkin” dibutuhkan peran pemerintah untuk dapat mendukung agar pasar semakin sempurna (Mankiw, 2004)<sup>2</sup>. Dalam perekonomian pasar banyak “eksternalitas” yang menyebabkan alokasi sumberdaya menjadi tidak fair. Kehadiran eksternalitas menyebabkan hak yang diterima seseorang tidak sesuai dengan pengorbanan yang diberikan dalam proses perekonomian. Dalam kehadiran eksternalitas dibutuhkan pihak ketiga yang disebut dengan pemerintah. Mankiw menulis bahwa pemerintah “mungkin” dapat meningkatkan kesempurnaan sistem pasar. Kata “mungkin” diberi tanda petik, karena dalam kenyataannya justru banyak peran pemerintah dapat memperburuk mekanisme pasar, sehingga dalam kasus tersebut pengurangan peran pemerintah justru dapat meningkatkan efisiensi pasar.

Dari uraian di atas perlu dipertegas lagi bahwa sistem pasar adalah sistem yang paling efisien, sehingga *fairness* dapat tercapai. Namun karena pasar penuh ketidaksempurnaan perlu ada campur tangan pemerintah agar pasar semakin sempurna. Jika pasar sempurna, pemerataan tetap tidak akan tercapai dengan sendirinya, sebab pemerataan juga ditentukan oleh kepemilikan sumber daya sebelum proses ekonomi dimulai (*endowment* awal) (Feldman, 2000)<sup>3</sup>. Dari uraian di atas juga didapatkan dua tataran keadilan. Keadilan jenis pertama yang disebut “*fairness*”, yakni bahwa semua orang mendapatkan sesuai haknya. Keadilan dalam tataran kedua adalah adanya pemerataan pendapatan, yang dapat dicapai jika terjadi distribusi aset.

### **3. Perencanaan dan Komunikasi Pembangunan**

Perencanaan pembangunan sangat dibutuhkan untuk memberikan arah dan pedoman pembuatan keputusan para pelaku ekonomi. Perencanaan pembangunan juga dapat menjadi signal arah kebijakan ekonomi yang akan ditempuh pemerintah. Perencanaan pembangunan membeberkan prioritas dan target sasaran pembangunan. Perencanaan pembangunan yang rasional juga dapat menjadi kiblat yang mampu mengkoordinir kegiatan ekonomi masyarakat. Ketidaksempurnaan informasi dan

kesulitan koordinasi dalam berbagai kegiatan perekonomian dapat dijumpai oleh adanya pedoman perencanaan pembangunan.

Perencanaan pembangunan haruslah rasional dan mengacu pada potensi perekonomian yang nyata, sehingga mampu memberikan gambaran kekuatan pasar yang sesungguhnya. Perencanaan pembangunan haruslah disosialisasikan dan dikomunikasikan dengan benar kepada seluruh pelaku perekonomian, agar ada pemahaman yang sama terhadap arah, prioritas, dan target perekonomian. Perencanaan pembangunan harus terus direvisi sesuai dengan berjalannya dinamika perekonomian, sehingga terus dapat menjadi pedoman masyarakat. Perencanaan yang dikomunikasikan dengan baik akan menekan resiko keputusan ekonomi dan meningkatkan efisiensi.

Perencanaan pembangunan yang dikomunikasikan dengan baik mampu memberikan informasi yang lebih sempurna kepada para pelaku ekonomi. Dengan informasi yang lebih baik para pelaku ekonomi mampu memformulasikan harapannya dengan lebih sempurna. Aktivitas ekonomi tidak hanya ditentukan oleh yang sudah terjadi, tetapi juga oleh pengharapan dari para pelaku ekonomi. Dalam dunia perekonomian yang semakin cepat faktor pengharapan semakin dominan dalam menentukan berbagai keputusan ekonomi.

Jaman Orde Baru perencanaan pembangunan dibuat baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang untuk menunjukkan arah, prioritas, dan sasaran pembangunan. Melalui berbagai media, salah satunya melalui P4, perencanaan pembangunan tersebut disosialisasikan kepada masyarakat dengan baik. Jaman reformasi, perencanaan pembangunan dibuat oleh BAPENAS, namun sosialisasi dan gaungnya tidak sekuat sosialisasi perencanaan pembangunan jaman orde baru.

Keberhasilan pembangunan negeri Cina adalah kemampuan perencanaan perekonomian dua jalur dan kemampuan mengkomunikasikannya kepada masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang diumumkan mencapai 13% diduga merupakan cara komunikasi untuk merayu investor asing masuk ke negeri Cina. Ketika investor masuk ke negeri Cina, karena mengharapkan pasar domestik yang berkembang karena adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, memang benar pertumbuhan perekonomian lalu menjadi tinggi.

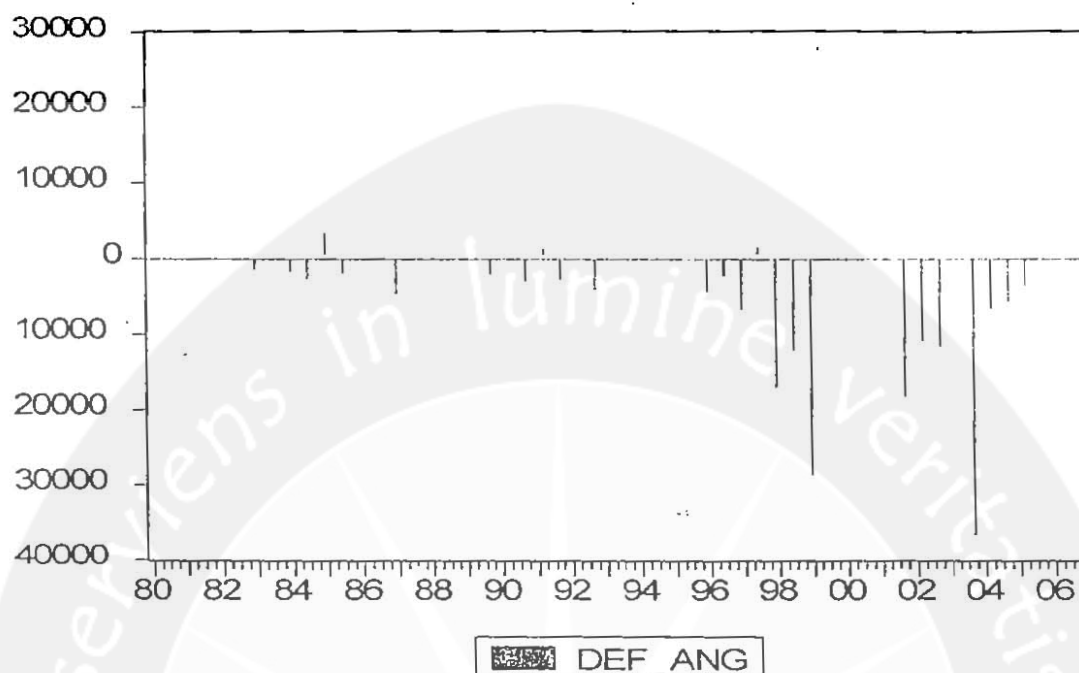
### 3. Anggaran Pemerintah

Anggaran pemerintah dibuat setiap tahun. Rencana anggaran pemerintah dapat mempengaruhi perekonomian baik melalui macam sumber pendanaannya, maupun melalui alokasi anggaran. Anggaran pemerintah mampu menjadi alat pendorong maupun penstabil perekonomian. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bisa bersifat berimbang, surplus, maupun defisit. Sumber pendanaan defisit anggaran yang umum dikenal adalah 1) pajak; dan 2) hutang pemerintah baik dari dalam negeri maupun luar negeri, maupun 3) mencetak uang. Anggaran berimbang, dan defisit bersifat ekspansif dan mendorong perekonomian. Sedangkan anggaran surplus bersifat kontraktif, dan menekan inflasi.

Melalui alokasi anggarannya pemerintah mampu mengarahkan jalannya perekonomian. Prioritas pembangunan sektor pertanian mampu menciptakan lapangan pekerjaan lebih banyak dari pada sektor lain dan lebih mendorong terciptanya pemerataan perekonomian, walaupun tingkat pertumbuhan yang dihasilkan relatif rendah.. Prioritas pembangunan sektor industri dan jasa mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi lebih cepat, namun biasanya diimbangi dengan ketimpangan yang semakin melebar.

Sejak Indonesia merdeka, anggaran pemerintah Indonesia hampir selalu dapat dikatakan menjalankan anggaran yang defisit. Defisit anggaran mendorong pertumbuhan ekonomi atau inflasi yang lebih tinggi. Bisa dimaklumi jika inflasi Indonesia selalu lebih tinggi dari negara-negara tetangga kita. Inflasi lebih menyengsarakan warga miskin daripada warga yang lebih kaya.

**Tabel I : Defisit Anggaran Pemerintah Indonesia 1980-2006 (Milyar Rupiah)**



#### 4. Stabilitas dan Efisiensi Sektor Moneter.

Tugas Bank Indonesia setelah independen pada tahun 2000 adalah terutama menstabilkan perekonomian terutama melalui target pencapaian inflasi yang moderat. Inflasi harus dijaga jangan terlalu tinggi dan jangan terlalu rendah. Inflasi yang terlalu tinggi akan merampok aset masyarakat. Inflasi yang terlalu rendah menghambat peningkatan produksi.

Dengan menggunakan instrumen moneter Bank Indonesia harus menjaga suku bunga dan jumlah uang beredar dalam rangka mengendalikan inflasi. Bank Indonesia memiliki kesulitan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Suku bunga Indonesia selalu lebih tinggi dibandingkan dengan suku bunga negara lain. Biaya kapital menjadi mahal, dan akhirnya biaya produksi menjadi mahal. Upaya menurunkan suku bunga selalu terkendala oleh tingginya inflasi di Indonesia. Tingginya inflasi dipicu oleh kebijakan pemerintah yang terus menerus menjalankan defisit anggaran, dan harapan masyarakat terhadap inflasi yang tinggi.

#### 5. Aturan Mengenai Eksploitasi Kekayaan Alam

Di dalam UUD 45, di pasal 33 ayat jelas tertulis bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. UUD 45 ini tidak dapat diterjemahkan lebih cermat oleh penyelenggara negara. Tidak ada aturan dan penegakan hukum yang kuat untuk melindungi yang lemah dari berbagai pihak yang mau mengeruk untung sendiri.

Eksplorasi kekayaan alam tidak disertai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitarnya, bahkan mereka menjadi lebih sengsara karena lingkungan hidup mereka dirusak. Mereka bahkan menderita karena dampak lingkungan yang dihasilkan. Banjir, polusi, hilangnya tempat mata pencaharian, adalah hasil dari eksploitasi yang tidak memperhatikan lingkungan. Pemerintah tidak berdiri sebagai pihak yang memperkuat pasar. Amdal memang sudah dilakukan, tetapi apakah sudah dilakukan dengan benar, dan dilaksanakan dengan baik?

## 6. Penutup

Pemerintah Indonesia kurang mampu untuk berdiri sebagai pihak yang memperkuat pasar. Berbagai aturan maupun pelaksanaannya belum mencerminkan proses penguatan pasar. Bahkan “pemerintah” dan “kelompok bisnis” nampak berdiri dominan melemahkan pasar. Sisi penawaran lebih kuat dari pada sisi permintaan. Pemerintah mengumumkan akan menaikkan gaji, inflasi sudah berjalan terlebih dahulu.

---

<sup>1</sup> Samuelson, Nordhaus, *Economics*, 18<sup>th</sup> edd, McGraw-Hill, International Edition, 2005

<sup>2</sup> Mankiw, Gregory, N., *Principle of Economics*, 3th Edd., Thomson, 2004

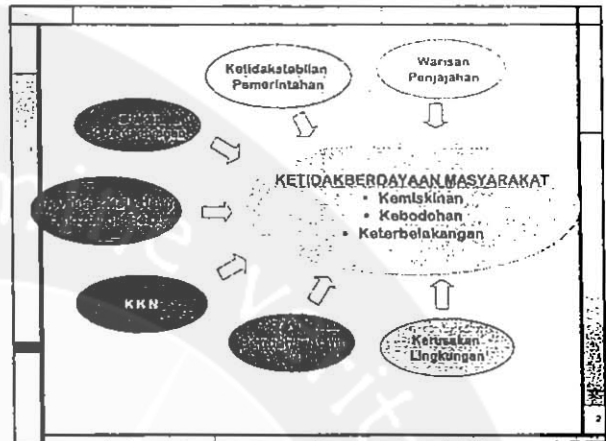
<sup>3</sup> Feldman, Allan, M., *Ekonomi Kesejahteraan*, alih bahasa oleh R. Maryatmo dkk., Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 200



## GERAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERKELANJUTAN

Oleh: Bambang Ismawan

Disampaikan dalam Seminar Nasional  
"PENGEMBANGAN KEBIJAKAN EKONOMI YANG  
BERKEADILAN BAGI SEMUA: CITA-CITA DAN REALITA"  
Diselenggarakan oleh ISKA DIY  
Yogyakarta, 8 November 2007



### Warisan Penjajahan

Sistem Penjajahan yang bertujuan dapatkan keuntungan sebesar-besarnya (Batigslot Politiek) dengan menguras sumber daya alam akibatkan kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan rakyat

- VOC, pedagang bersenjata, menguasai perdagangan nusantara.
- Cultur Stelsel (1830), tanam paksa perparah kemiskinan.
- Agrarische wet 1870, masuknya kapitalisme barat.
- Dualisme ekonomi (Boeke)
- Pemerintah Kolonial Belanda tidak meninggalkan Sistem Pemerintahan

### Ketidastabilan Pemerintahan

Sistem Pemerintah Trial & Error:

- Multi Partai >> Single Partai
- Presidential >> Parlementer
- Sentralisasi >> Desentralisasi
- Tarik-menarik Berbagai Kepentingan (ideologi, sektarian, kedaerahan)

### Jebakan Ketergantungan

- Orla : Sistem Partai dan Onderbouw
- Orba : Sistem Proyek bagi Pembiayaan Pembangunan (*top-down*)
- Reformasi : 2 Sistem tersebut berlangsung bergandengan di tingkat daerah

### Devaluasi Mata Uang Yang Sangat Besar

50.000.000.000 % selama 60 tahun

- Th. 50-an : Sanering (Gunting Sjafouddin) 50%
- Th. 1966 : penyusutan keuangan Rp. 1000,- menjadi Rp. 1,- (100.000 %)
- Th. 1967, US \$ 1 = Rp.84 – Rp.100, rata-rata Rp.90; tahun 2007 = Rp. 9000 (10.000 %)


Catatan:  
Di Thailand, 60 tahun lalu, US \$ 1 = 20 Bath.  
Sekarang US \$ 1 = 40 Bath (100%)

### K K N

- Menggerogoti kekayaan negara
- Parahnya kesenjangan kaya-miskin
- Ketidakpercayaan pada lembaga publik

### Bencana Alam

- Gempa Bumi
- Tsunami
- Angin Topan & Badai
- Letusan Gunung Berapi



### Kerusakan Lingkungan

- Kerusakan hutan dan lahan
  - Banjir
  - Tanah longsor
- Perubahan Iklim dan Pemanasan Global



Ketidakterdayaan Masyarakat

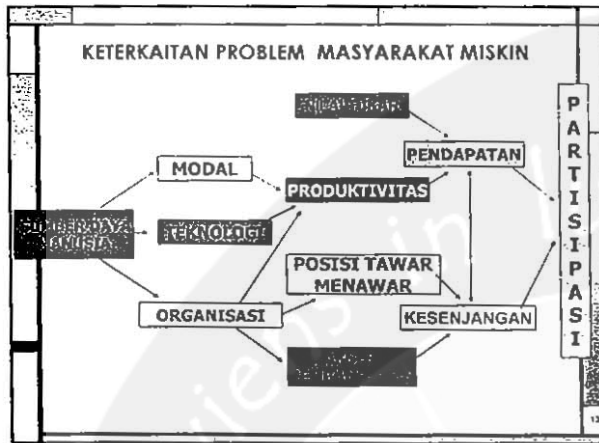
≠

Cita-Cita Kemandirian  
 Meningkatkan Kesejahteraan  
 Umum  
 Mencegah Keadungan  
 Abad  
 Memperbaiki Keturunan

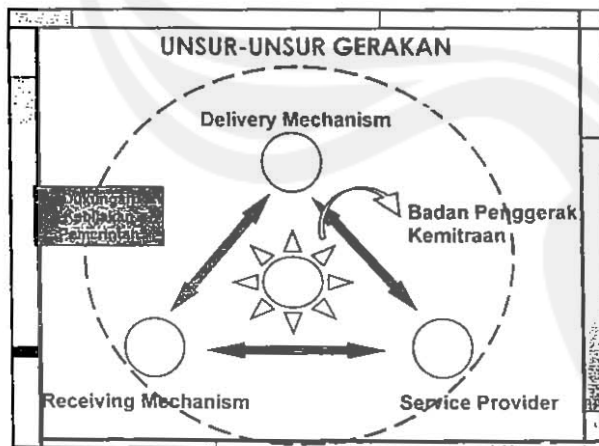
### PANGGILAN BERPERAN

- Walaupun konstitusi menyatakan, negara mewujudkan kesejahteraan umum dan kehidupan yang cerdas namun usaha ke arah itu semakin kabur efektivitasnya.
- Ketidakterdayaan masyarakat yang telah berlangsung lama, saat ini tetap tidak jelas prospeknya. Apatisme yang merajalela membahayakan masa depan bangsa.
- Masyarakat warga (civil society) terdipanggil untuk memberdayakan masyarakat secara berkelanjutan dan mengembangkan usaha itu dengan cara bermitra dengan dunia usaha, serta mendorong pemerintah mengarahkan kebijakan mendukung upaya-upaya masyarakat warga.
- Peluang tampilnya peran masyarakat warga semakin besar dan banyak contohnya, antara lain : Gerakan Pengembangan Keuangan Mikro yang dipelopori oleh Muhammad Yunus dari Bangladesh, Sang Penerima Penghargaan Nobel untuk Perdamaian.





**GERAKAN  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
BERKELANJUTAN**



- Receiving Mechanism**
- Community Based Organization
  - Kelompok Swadaya Masyarakat
  - Kelompok Adat
  - Koperasi Primer, Credit Union, dll

<b>Delivery Mechanism</b>	
<b>Pengurus dan Penggerak :</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ormas dan LSM Pertanian</li> <li>• Ormas dan LSM Nelayan dan Kelautan</li> <li>• Ormas dan LSM Perburuhan</li> <li>• Ormas dan LSM Wanita</li> <li>• Ormas dan LSM Kepemudaan</li> </ul>	

<b>Service Provider</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>□ Lembaga Pendidikan dan Pelatihan</li> <li>□ Lembaga Penelitian dan Pengembangan</li> <li>□ Lembaga Perbankan</li> <li>□ Lembaga Pelayanan Pemerintah</li> <li>□ Lembaga Pemberitaan (Pers)</li> </ul>	

<b>Badan Penggerak Kemitraan</b>	
<b>Badan Independen; berfungsi:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mengembangkan jejaring dan kemitraan antar Receiving Mechanism, Delivery Mechanism dan Service Provider</li> <li>▪ Selenggarakan Capacity Building</li> <li>▪ Mendorong peraturan perundangan yang memungkinkan keberdayaan masyarakat</li> <li>▪ Menggalang kerjasama dengan lembaga-lembaga Pemerintah, Bisnis, Filantropi didalam dan diluar negeri</li> </ul>	

<b>Dukungan Kebijakan Pemerintah</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menciptakan suasana yang kondusif untuk berkembangnya inisiatif masyarakat serta mendorong tumbuhnya inovasi untuk berkembang lebih lanjut.</li> <li>▪ Reposisi Peran Pemerintah akan pemberdayaan masyarakat, pengelolaan dana bergulir diakhiri, dialihkan pada penguatan kapasitas masyarakat mengakses pelayanan lembaga keuangan (Bank)</li> <li>▪ Mengharuskan lembaga keuangan (Bank) mengalokasikan 5% - 10% dana pihak ketiga untuk kredit usaha mikro. Catatan: dana pihak ketiga di lembaga perbankan 2006: Rp. 1,287 triliun, 5%-nya Rp. 64,85 triliun</li> </ul>	

### PENDEKATAN PEMBERDAYAAN

- Pengembangan kelembagaan Masyarakat Mandiri.
- Pengembangan dan Pelayanan Keuangan Mikro.
- Pengembangan Produksi Pertanian melalui pemanfaatan media massa.
- Pengembangan pendidikan alternatif (Jarimatika – Sinergy Creative).
- Pengembangan teknologi Mikrohidro untuk listrik (IBEKA)

### PEMBERDAYAAN MELALUI PENDEKATAN PENGEMBANGAN DAN PELAYANAN KEUANGAN MIKRO

### STRUKTUR EKONOMI INDONESIA

□ Usaha Besar	40 ribu (0,08%)
□ Usaha Menengah	680 ribu (1,5%)
□ Usaha Kecil	1.620 ribu (3,57%)
□ Usaha Mikro	<b>43.000 ribu (94,84%)</b>
<b>Total</b>	<b>45.340 ribu</b>

Sumber : Kementerian Negara Koperasi & UKM, 2000

### LETAK STRATEGIS USAHA MIKRO

	<i>The elder poor</i>	
<i>The poorest</i>	<b>Usaha Mikro</b> <i>(Economically Active poor)</i>	<i>Small scale business</i>
	<i>The younger poor</i>	

BIDANG KEGIATAN USAHA MIKRO	
<input type="checkbox"/>	Kegiatan primer dan sekunder : pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan (semua dilaksanakan dalam skala terbatas dan subsisten), pengrajin kecil, penjahit, produsen makanan kecil, dll
<input type="checkbox"/>	Kegiatan tersier : transportasi (dalam berbagai bentuk), kegiatan sewa menyewa baik rumah, tanah, maupun alat produksi, dll
<input type="checkbox"/>	Kegiatan distribusi : pedagang di pasar, pedagang kelontong, pedagang kaki lima, penyalur dan agen, serta usaha sejenisnya.
<input type="checkbox"/>	Kegiatan jasa lain : pengamen, penyemir sepatu, tukang cukur, montir, tukang sampah, juru potret jalanan, dan sebagainya

Kesulitan yang Dihadapi Usaha Mikro		
Jenis Kesulitan	IKR	IK
<input type="checkbox"/> Kesulitan modal	34.55%	44.05%
<input type="checkbox"/> Bahan baku	20.14%	12.22%
<input type="checkbox"/> Pemasaran	31.70%	34.00%
<input type="checkbox"/> Kesulitan lainnya	13.60%	9.73%

IKR: Industri Kecil Rumah Tangga (Usaha Mikro);  
IK: Industri Kecil (Usaha Kecil)  
Sumber: BPS terolah, 1999

Darimana Modal Diperoleh		
Uralan	IKR	IK
<b>Sumber Modal</b>		
<input type="checkbox"/> Modal Sendiri	90.36%	69.82%
<input type="checkbox"/> Modal Pinjaman	3.20%	4.76%
<input type="checkbox"/> Modal Sendiri dan Pinjaman	6.44%	25.42%
<b>Jumlah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b>Asal Pinjaman</b>		
<input type="checkbox"/> Bank	18.79%	59.78%
<input type="checkbox"/> Koperasi	7.09%	4.85%
<input type="checkbox"/> Institusi Lain	8.25%	7.63%
<input type="checkbox"/> Lain-lain	70.35%	32.16%

Sumber: BPS, 1998

Pentingnya Usaha Mikro	
<input type="checkbox"/>	Jumlahnya sangat besar & punya potensi berkembang cepat
<input type="checkbox"/>	<i>Vulnerable</i> , bila tak diberdayakan menyebabkan kemiskinan makin besar & menjadi beban seluruh bangsa
<input type="checkbox"/>	Bila diberdayakan secara tepat akan menjadi usaha kecil, yang kemudian berkemungkinan menjadi usaha menengah
<input type="checkbox"/>	Usaha mikro yang mendapat pelayanan keuangan pendapatannya meningkat per bulan rata-rata 87,34% (Mat Syukur, 2002)
<input type="checkbox"/>	Dari penelitian terhadap usaha kecil (53% dari usaha mikro), pembiayaan merupakan faktor determinan usaha mikro "naik kelas" menjadi usaha kecil (JBIC, REDI, Bappenas, Development Alternatives)

## KEUANGAN MIKRO

- Makhluik baru yang lahir dari "ibu" yang berorientasi pada *social advancement* dengan "Ayah" yang berorientasi pada *business finance* (Tony Fernandes)
- *Development instrument* yang efektif untuk menanggulangi kemiskinan dan *sound business* (Gert van Maanen)
- Keuangan mikro sudah ada di Indonesia sejak 100 tahun yang lalu (arisan, lumbung desa, lumbung pith nagari, jimpitan, aktifitas simpan pinjam, dll) namun sebagai program dan industri belum bisa berbuat banyak.

## PRINSIP KEUANGAN MIKRO

(Microcredit Summit, Washington 1997)

1. Menjangkau yang miskin
2. Menjangkau dan memberdayakan perempuan
3. Mengembangkan kelembagaan berkelanjutan secara finansial
4. Dampaknya dapat terukur

## MODEL PELAYANAN KEUANGAN MIKRO

1. Saving led microfinance  
*Membership based* dimana mobilisasi keuangan dari Usaha Mikro sendiri. Contoh: Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), *Credit Union* (CU), Koperasi Simpan Pinjam (KSP), dll.
2. Credit led microfinance  
Sumber keuangan terutama bukan dari mobilisasi tabungan Usaha Mikro, namun sumber lain. Contoh : Badan Kredit Desa (BKD), Lembaga Dana dan Kredit Pedesaan (LDKP), Grameen Bank model, ASA model (Bangladesh)

## MODEL PELAYANAN KEUANGAN MIKRO

3. Micro banking  
Sektor perbankan yang didesain untuk melakukan pelayanan keuangan mikro. Bank tersebut adalah BRI, BPR, Danamon Simpan Pinjam.
4. Linkage model  
Memanfaatkan kelembagaan yang ada, KSM & lembaga keuangan (bank). Pihak bank mendapat nasabah & pengusaha mikro dapat akses keuangan. Hal ini sering disebut Pola Hubungan Bank dan Kelompok Swadaya Masyarakat (PHBK)

## TANTANGAN

1. Lemahnya kesadaran dan pengetahuan adanya peluang untuk pemberdayaan keuangan mikro.
2. Rendahnya niat masyarakat warga bergerak di "financial practice".
3. Rendahnya ketrampilan masyarakat warga mengelola keuangan.
4. Sedikitnya "loanable fund" untuk microenterprise.
5. Lemahnya peluang hukum untuk melindungi usaha-usaha tersebut.

## TERIMA KASIH

**Bambang Ismawan**

Ketua Yayasan Bina Swadaya  
Sekretaris Jenderal Gema PKM  
Pemimpin Umum TRUBUS  
Email : bisma@cbn.net.id  
www.binaswadaya.org  
www.gema-pkm.org